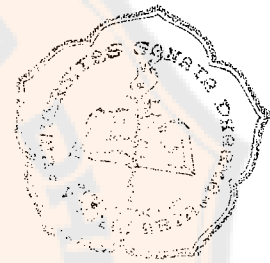


**PERANAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG
POLITIK DI INDONESIA 1945-1958**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



oleh :

Murtini

001314041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2005

SKRIPSI

**PERANAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG
POLITIK DI INDONESIA 1945 - 1958**

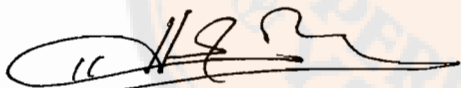
Oleh :

Murtini

NIM : 001314041

Telah disetujui oleh :

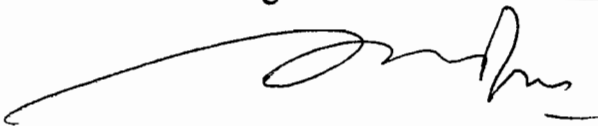
Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal 1 Agustus 2005

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adikusilo J. R., S.Th.

Tanggal 9 September 2005

SKRIPSI

**PERANAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG
POLITIK DI INDONESIA 1945 - 1958**

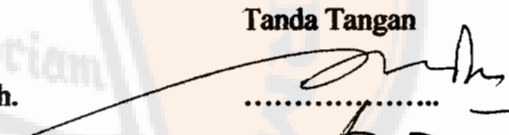
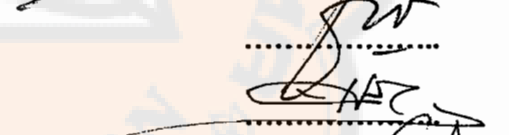
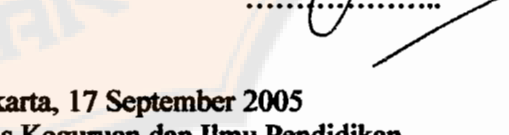
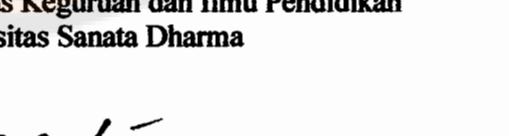
Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Murtini

NIM : 001314041

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 17 September 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.	
Anggota	: Drs. A.A. Padi	

Yogyakarta, 17 September 2005
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan untuk,

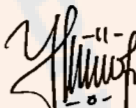
- ✦ *Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan aku rahmat dan karunianya.*
- ✦ *Bapakku F.Kasimin dan Ibuiku TH.K, Minarsih tercinta*
- ✦ *Mbak Christina Budi Murwati dan Mas Yohanes Murwanto dan Mbak Albina Sri Parsah tercinta*
- ✦ *Pak tuo Kartogiono dan keluarga Alianto Hadi*
- ✦ *Seseorang yang pernah singgah dihatiku, terima kasih atas perhatiannya, kritik dan sarannya selama ini..*
- ✦ *Sahabat-sahabatku tercinta, Inung, Leni , Desri dan Windarsih (Cenilku), terimakasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka dan sahabatku lainnya, Mery cristin, Andi, Rina, Eni lestari, Encun yang lucu, Viky, Eko Prasetyo, Agnes, Dodi Irawan terima kasih atas semuanya.*
- ✦ *Sahabat-sahabatku di kos Bambang tutuko 9C, Endah, Cicil, Mistrati, Sri Mujiati terima kasih atas dukungan dan kebersamaanya*
- ✦ *Seseorang yang kelak akan menemaniku seumur hidup.*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 17 September 2005.

Penulis


Murtini

MOTTO

Rasa bahagia tidak terletak pada kemewahan dan keadaan yang serba cukup. Rasa bahagia lebih banyak timbul dari kepuasan hati yang tidak tertekan dan bebas, berani mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, tidak mengalahi terhadap keadaan, tidak putus asa dan percaya kepada kekuatan yang ada pada diri sendiri.

(Mohammad Natsir)

Kesabaran tidak ditentukan dengan seberapa kita dapat menahan tekanan dari luar, tetapi seberapa lama kita dapat menahan tekanan dari diri sendiri

(Amsal 16 : 32)

Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan.

(Collin Powell)

Belajar dari kesalahan adalah awal dari kesuksesan.

(Penulis)

Persahabatan sulit dijelaskan dan tidak pernah dipelajari di sekolah, namun jika seseorang tidak berusaha mempelajari makna persahabatan, dia tidak dapat mempelajari apa-apa.

(Penulis)

ABSTRAK

Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958

Oleh : Murtini

Nim : 001314041

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis **“Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958”**. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik?, kedua apa peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik? dan ketiga apa hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang mencakup : heuristik, kritik sumber, interpretasi serta historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan personal. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik disebabkan oleh keadaan keluarga yang mendukung dan lingkungan yang tidak asing dengan politik. Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik 1945-1958 merupakan bukti semangat perjuangannya dalam mempertahankan Republik Indonesia. Mohammad Natsir aktif dalam keanggotaan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), Menteri Penerangan, Ketua Partai Masyumi dan Perdana Menteri.

Hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik bagi bangsa Indonesia terlihat dari usahanya dalam mempertahankan Republik Indonesia yang baru merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya Kementerian Penerangan Republik Indonesia, terbentuknya NKRI dan meningkatnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu usaha Mohammad Natsir ini akan dilestarikan dalam perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya.

ABSTRACT
POLITICAL ROLES OF MOHAMMAD NATSIR IN INDONESIA
1945-1958

By : Murtini
Nim : 001314041

This thesis aims to describe and to analyze Mohammad Natsir's political role in Indonesia during 1945 to 1958. There are three main problems which are going to discuss in this, thesis : First, what factors that cause Mohammad Natsir worked in politics, second, what are Mohammad Natsir's roles in politics ro and Third, what might be result of Mohammad Natsir's struggle in politics of Indonesia

The writer uses historical method to do the research by doing some steps. They are heuristic, resources criticism, intepretation and historiography. The approaches used are political and personal approach. This thesis is descriptive analysis.

Through this research, the writer finds that family condition and the environment are so familiar so that influence him to work actively in politics. Mohammad Natsir's roles in politic between 1945-1958 proved his spirit of struggle in defending Republic of Indonesia. Mohammad Natsir was active in KNIP (Central Indonesia National Commete) membership. Further more, He also became the minister of information, the leader of Masyumi party and the prime minister.

The result of Mohammad Natsir's struggle in politics for Indonesia can be seen from his efforts in deferding the Republik of Indonesia which han been independent. It was shown by establishing the Indonesia ministri of information, the presentation of NKRI (United-Republic State of Indonesia), the economy improvement of Indonesia.

Therefore, Mohammad Natsir's efforts would be continued in the Indonesian development in the future.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat meraih gelar sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

- 1 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- 2 Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- 3 Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- 4 Bapak Prof.Dr.P.J.Suwarno, S.H, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5 Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 6 Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd, sebagai pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan, bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- 7 Semua Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
- 8 Teman-teman angkatan 2000, terima kasih atas bantuan, persahabatan dan kerjasamanya selama penulis menempuh studi di Universitas Sanata Dharma.
- 9 Kedua orang tuaku dan segenap keluarga besarku (yogya dan sintang) yang telah memberikan dorongan material dan spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10 Sahabatku dalam grup 4 sekawan (Inung, Leni dan Desri) yang telah membantu dan menyertaiku dalam suka dan duka.
- 11 Teman-temanku kost Bambang Tutuko 9 C, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi Universitas Sanata Dharma.

Yogyakarta, 17 September 2005

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	
1. Tujuan Penulisan	9
2. Manfaat Penulisan.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kajian Teori	14

F. Hipotesis	15
G. Metode dan Pendekatan	
1. Metode Penulisan	16
2. Pendekatan	19
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MOHAMMAD

NATSIR TERLIBAT DALAM BIDANG POLITIK..... 22

A. Faktor Keluarga.....	22
B. Faktor Pendidikan	24
C. Watak dan Kepribadian.....	32

BAB III. PERANAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG

POLITIK 1945-1958..... 36

A. Peranan Mohammad Natsir sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945-1946	37
B. Peranan Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan tahun 1946-1949.....	40
C. Peranan Mohammad Natsir sebagai Ketua Partai Masyumi tahun 1949-1958.....	51
D. Peranan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri tahun 1950-1951.....	61

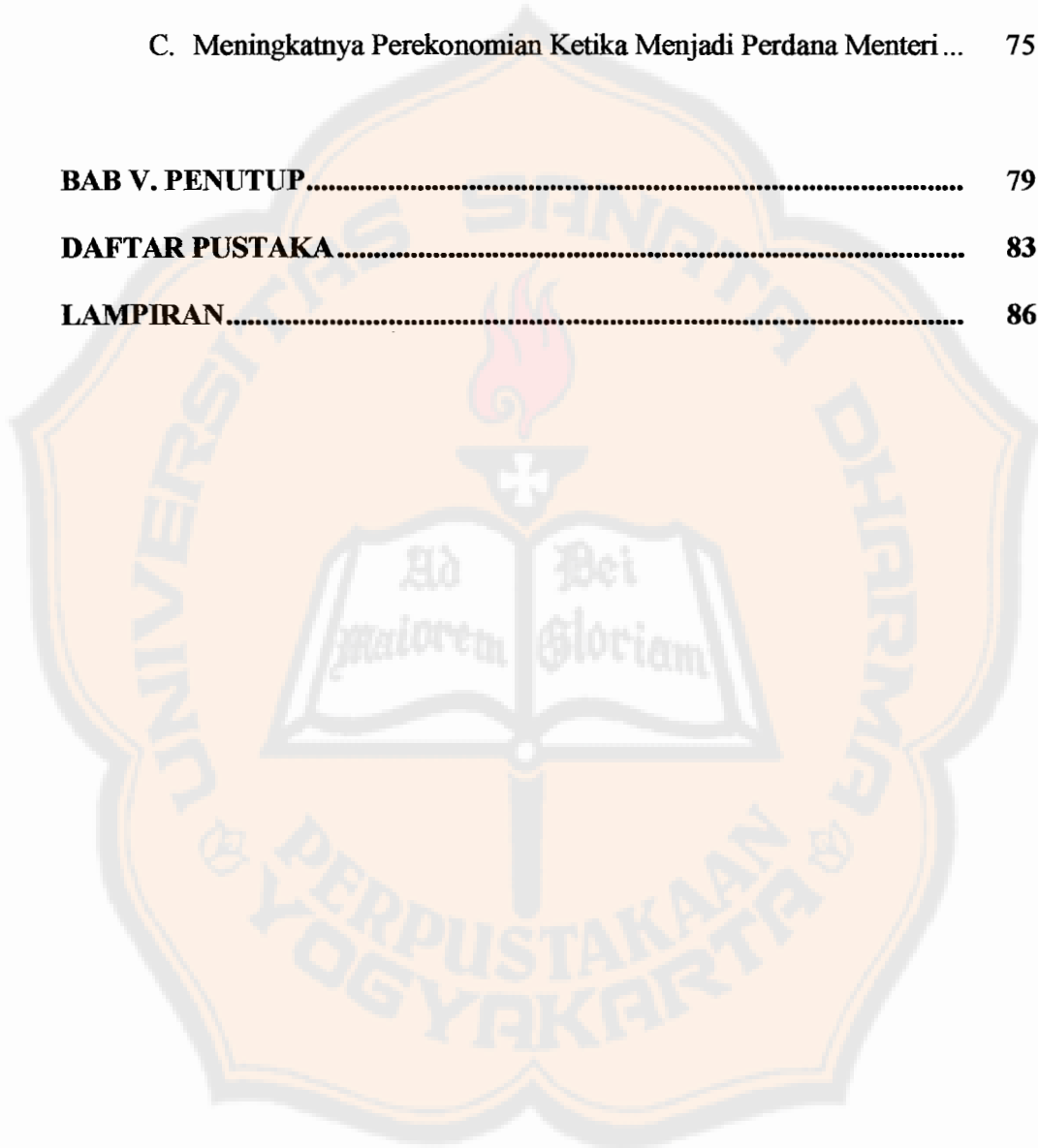
BAB IV. HASIL PERJUANGAN MOHAMMAD NATSIR DALAM

BIDANG POLITIK.....	69
A. Kementerian Penerangan Republik Indonesia	70
B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	71
C. Meningkatnya Perekonomian Ketika Menjadi Perdana Menteri ...	75

BAB V. PENUTUP.....	79
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	86
----------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1 : Gambar Tokoh Mohammad Natsir	86
2. Lampiran 2 : Himbauan Mohammad Natsir kepada rakyat Indonesia	87
3. Lampiran 3 : Pidato Mohammad Natsir dalam mengatasi masalah Aceh ..	89
4. Lampiran 4 : Mosi Integral Mohammad Natsir	93
5. Lampiran 5 : Silabus	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dan bersamaan dengan itu pula banyak rakyat Indonesia yang berkumpul di halaman rumah Bung Karno di Pengangsaan Timur no. 56 untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi yang merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Tepat pukul 10.00 Ir Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan, dan diikuti dengan pengibaran sang Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan ini diumumkan keseluruh penjuru dunia dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia telah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di atas dunia.¹

Setelah Indonesia merdeka, PPKI kemudian mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pembentukan komite ini merupakan badan pembantu presiden yang menjadi bagian dari eksekutif. Salah satu tokoh yang terlibat dalam komite ini adalah Mohammad Natsir yang mulai bergabung pada bulan September 1945.

¹ Dr.M.Ridwan Indra S.H,Sophian Marthabaya S.H, "Peristiwa-Peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-08-1945", Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 1.

Mohammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908, di Jembatan Berukir Alahan Panjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat dari seorang ibu yang bernama Kadijah. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Sejak berumur 8 tahun Mohammad Natsir sudah berpisah dengan kedua orang tuanya untuk menempuh Pendidikan. Hal ini membuat Mohammad Natsir dituntut untuk bisa hidup mandiri dan dewasa dalam menjalani kehidupan.

Pendidikan yang ditempuh Mohammad Natsir adalah sekolah rakyat yang hanya bertahan di kelas II, kemudian melanjutkan sekolah HIS (*Hollands Inlandse School*) di Padang, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) pada tahun 1923. Di sekolah MULO itu Mohammad Natsir mengikuti organisasi Natipij dari perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB), semacam PII sekarang.² Kemudian pada tahun 1927 Mohammad Natsir melanjutkan sekolahnya ke AMS bagian A (*Algemeen Middelbare School Afdelling*) di Bandung. Selama menempuh sekolah di AMS Mohammad Natsir banyak belajar tentang kebudayaan, ilmu agama dan ilmu politik.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Mohammad Natsir melanjutkan studinya ke Pembela Islam, selain itu juga aktif dalam bidang pendidikan. Ia menjadi seorang guru dan berhasil mendirikan sarana pendidikan bagi rakyat yang masih membutuhkan pendidikan, karena ia menyadari bahwa rakyat Indonesia masih membutuhkan pendidikan yang

² Yusuf Abdullah Puar, Pak Natsir 70 tahun : *Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1978, hlm. 7.

baik. Keaktifannya tidak hanya itu saja, ia juga aktif dalam organisasi pemuda JIB (*Jong Islamieten Bond*) yang akhirnya membawanya menjadi politikus dan tokoh agama.

Telah disinggung diatas bahwa bangsa Indonesia telah memperoleh kemerdekaan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Indonesia sudah terlepas dari penjajah. Kedatangan sekutu ke Indonesia memberikan kesempatan kepada Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Hal ini terbukti dari kedatangan pasukan Belanda yang dikenal dengan NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) bersama sekutu.

Kedatangan NICA ini pada awalnya disambut baik oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, tetapi setelah diketahui bahwa NICA adalah Belanda pemerintah dan rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Ketegangan yang terjadi ini membuat Sutan Syahrir dan Van Mook mengadakan perundingan pada tanggal 17 September 1945 dibawah pimpinan Jendral Christison. Namun perundingan ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

Oleh karena itu pada tanggal 3 Januari 1946 Presiden Soekarno menunjuk Sutan Syahrir untuk membentuk kabinet baru. Dalam kabinet ini Mohammad Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan. Kemudian perundingan antara Belanda dan Indonesia dilaksanakan kembali pada bulan April 1946 di Hoge Veluwe dan menghasilkan suatu kesepakatan yang

menyatakan bahwa pemerintah Belanda hanya menerima persetujuan yang dibentuk protokol dan hanya bersedia mengakui RI berdaulat atas Jawa dan Madura.³

Pada tanggal 15 November 1946 antara Belanda dan Indonesia kembali mengadakan perundingan di Linggajati. Dalam perundingan ini Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn dan Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir. Perundingan ini menghasilkan persetujuan yang terdiri dari 17 pasal, salah satunya adalah pemerintah Belanda mengakui pemerintahan Republik Indonesia berkuasa defacto atas Jawa, Madura dan Sumatera, sehingga pasukan Belanda yang menduduki bagian-bagian dari daerah defacto itu harus dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Naskah persetujuan Linggajati yang menghasilkan 17 pasal ini ditentang hebat, baik dalam parlemen Belanda maupun dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun setelah mendapat penegasan, akhirnya kedua belah pihak menyetujuinya, dan pada tanggal 25 Maret 1947 persetujuan Linggajati ditandatangani oleh kedua delegasi di Istana Negara Jakarta.

Pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda melancarkan agresinya yang pertama. Keadaan ini membuat bangsa Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan kembali. Perundingan ini diselenggarakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama Renville. Dalam perundingan tersebut delegasi

³ Drs. Susanto Tirtoprodjo. S.H, "*Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*", P.T. Pembangunan Sahari 84, Jakarta, 1963, hlm. 19.

Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Dan pada tanggal 17 Januari 1948 perundingan ini menghasilkan persetujuan, yang salah satu isi dari persetujuan tersebut adalah Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera harus dibentuk.

Setelah persetujuan ditandatangani, timbullah banyak reaksi terutama dari beberapa partai di antaranya Masyumi, Syahrir dan PNI yang menarik dukungan terhadap Kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap gagal dalam mengambil suatu keputusan. Akibatnya pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan segera menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kemudian untuk mengatasi masalah yang akan muncul, maka Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet pada tanggal 29 Januari 1948. Dalam kesempatan ini pula Mohammad Natsir kembali menjabat sebagai Menteri Penerangan RI.

Pada tanggal 19 Desember 1948, untuk kedua kalinya Belanda melancarkan agresinya dengan menyerang Ibukota RI Yogyakarta, serangan ini dikenal sebagai "Clash kedua".⁴ Daerah yang di bom oleh Belanda adalah Maguwo dan wilayah sekitarnya, sehingga secara keseluruhan Yogyakarta berhasil diduduki sekitar jam 15.00. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta menteri-menteri ditangkap dan diasingkan ke Prapat dan Bangka, termasuk didalamnya adalah Mohammad Natsir.

⁴ *Ibid*, hlm 26.

Sebelum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap, pada pagi hari tanggal 19 Desember 1949 telah mengadakan sidang kabinet yang memutuskan bahwa Mr. Syarifuddin Prawiranegara diberi mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Mandat ini akhirnya sampai ditelinga Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang pada saat itu masih berada di Sumatera Utara. Dan Mandat ini pun langsung dilaksanakan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan dikeluarkannya kabinet PDRI.

Pada tanggal 7 mei 1949 ditandatanganinya perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen Statement yang memuat kesedian Belanda untuk membebaskan pemimpin RI ke Yogyakarta dan akan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar. Pada saat persetujuan ini ditandatangani, pemimpin PDRI tidak dihubungi, maka pada tanggal 4 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirim utusan ke Sumatera Barat.

Utusan yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta ini melibatkan Mohammad Natsir, Dr. J. Leimena, Dr. Halim dan Agus Yaman. Sebagai ketua dalam utusan ini Mohammad Natsir masih menjabat sebagai Menteri Penerangan dan mempunyai tanggungjawab yang penuh untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin PDRI yang berada di Sumatera Barat tepatnya di bukit tinggi.

Setelah menyelesaikan tugas Mohammad Natsir bersama Mr. Syafruddin Prawiranegara dan lainnya kembali ke Yogyakarta pada tanggal

10 Juli dan mendarat di bandar udara Maguwo Yogyakarta pada pukul 10.45 pagi. Di bandar udara rombongan ketua PDRI dan tokoh-tokoh gerilya tersebut disambut oleh wakil Presiden Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Mohammad Roem, Mr. Tajuddin Noor, dan lain-lain.⁵ Kemudian pada tanggal 13 Juli 1949 dilangsungkan sidang kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden, dalam sidang ini Mr. Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Telah disinggung bahwa Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan Roem Royen dan telah menghasil kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Salah satu isi dari perundingan Roem_Royen tersebut adalah akan dilaksanakan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 dan telah menghasilkan kesepakatan, yang salah satu isinya adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Indonesia Serikat harus dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1950.

Setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk, banyak terjadi reaksi baik itu dari Indonesia maupun dari luar yang menuntut kembalinya negara kesatuan dan melakukan peleburan. Walaupun demikian masih ada beberapa daerah yang tidak mau meleburkan diri menjadi RI yaitu Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Sumatera Selatan (NSS). Keadaan ini membuat Mohammad Natsir sebagai tokoh politik mengeluarkan "Mosi Integral" yang disampaikan kepada Dewan

⁵ H. Endang Saifuddin Anshari, M. Amien Rais, 1988. *"Pak Natsir 80 : Pandangan dan Penilaian Generasi Muda"*, Media Da'wah, Jakarta, hlm. 13.

perwakilan RIS pada tanggal 3 April 1950. Dan dengan demikian dapat terciptalah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Mohammad Natsir ditunjuk oleh Presiden menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950. Pembentukan Kabinet Natsir dan berlakunya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengganti RIS berarti telah berakhir pula periode transisi menuju kemerdekaan dan bagi Kabinet Natsir ini berarti beban yang cukup berat untuk mengembalikan situasi menjadi normal. Jabatan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1951.

Di akhir masa jabatannya dalam bidang politik pada tahun 1957 sampai 1958, Mohammad Natsir melibatkan diri menjadi anggota dalam Lembaga Konstitusi, yang ketika itu ia masih menjabat sebagai ketua partai Masyumi. Dalam lembaga ini ia berusaha memperjuangkan hukum-hukum Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, karena menurutnya Pancasila adalah paham sekularisme yang tidak bersumber pada wahyu Ilahi. Namun usaha ini tidak berhasil tercapai karena banyak dari tokoh-tokoh Islam lainnya yang tidak menyetujui ide Mohammad Natsir tersebut.

Mohammad Natsir adalah salah satu tokoh politikus yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.. Sejak kecil Mohammad Natsir mempunyai semangat perjuangan yang tinggi hingga akhirnya terwujud ketika beliau terlibat dalam berbagai organisasi yang membawanya menjadi tokoh politik dan tokoh

agama yang sampai sekarang dikenang oleh rakyat Indonesia. Banyak tulisan-tulisan yang mengarah pada perjuangannya baik dalam bidang politik, agama maupun pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi yang berjudul “ Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958 “, penulis merumuskan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik ?
2. Apa saja peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik pada tahun 1945-1958 ?
3. Apa hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik pada masa kemerdekaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik
 - b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa saja peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik tahun 1945-1958.
 - c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik pada masa kemerdekaan.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Sanata Dharma

Selain untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial, juga untuk menambah bahan sebagai bacaan yang berguna bagi pembaca yang berada di lingkungan Universitas Sanata Dharma maupun bagi pembaca yang berada diluar lingkungan Universitas Sanata Dharma.

b. Bagi Perkembangan Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah tentang peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber-sumber tertulis yaitu berupa buku-buku. Buku ini digunakan sebagai bahan penunjang penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, buku yang ditulis oleh Mohammad Natsir, 2004, *Islam Sebagai*

Dasar Negara, Sega Arsy, Bandung. Buku ini menguraikan tentang isi pidato Mohammad Natsir dalam sidang Konstituante yang diselenggarakan pada tahun 1957. Pada kesempatan ini Mohammad Natsir berusaha untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia dan menolak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu buku ini dapat membantu menganalisis peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik, khususnya peranannya sebagai ketua partai Masyumi periode 1949 sampai 1958.

Kedua, tulisan Mohammad Natsir, 1989, *Mohammad Natsir Politik Melalui Jalur Dakwah*, Majalah Tempo tanggal 2 Desember 1989. Tulisan ini menguraikan tentang kehidupan Mohammad Natsir dari masa mudanya yang telah terjun dalam dunia politik sampai terlibat dalam keagamaan. Tulisan ini untuk membantu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik dan peranannya dalam bidang politik di Indonesia.

Ketiga, buku karangan Mohammad Natsir, 1973, yang berjudul *Capita Selecta*, Bulan Bintang, Jakarta. Buku ini menguraikan tentang pandangan dan kegiatan Mohammad Natsir dalam dunia politik dan agama. Maka buku ini dapat membantu menganalisis peranan dan hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, karangan Ajib Rosidi, 1990, yang berjudul *Mohammad Natsir Sebuah Biografi jilid I dan II*, Giri Mukti Pasaka, Jakarta. Pada jilid I buku ini menguraikan kehidupan Mohammad Natsir dari lahir, masa muda sampai

menjelang kedatangan Jepang yaitu sampai dengan masa polemik antara Mohammad Natsir dengan Soekarno. Sedangkan jilid II yang berjudul *Mohammad Natsir Sebuah Biografi* menguraikan tentang karier Mohammad Natsir dalam pemerintahan sampai Mohammad Natsir ditahan oleh Soekarno akibat terlibat dalam pemberontakan PRRI-Persemesta. Maka kedua buku ini dapat membantu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik dan peranannya dalam bidang politik di Indonesia.

Kedua, buku yang ditulis Yusuf Abdullah Puar, 1978, *Mohammad Natsir 70 tahun : kenang-kenangan kehidupan perjuangan*, Pustaka antara, Jakarta. Buku ini menguraikan tentang semangat perjuangan Mohammad Natsir dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang menghantarkannya menjadi politikus dan tokoh agama yang terkemuka. Maka buku ini dapat membantu menganalisis faktor-faktor Mohammad Natsir terlibat dalam dunia politik, peranan dan hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia.

Ketiga, buku karangan Dr. Thohir Luth, 2001, yang berjudul *Mohammad Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta. Buku ini menguraikan tentang perjuangan Mohammad Natsir dalam berbagai aspek kehidupan yaitu politik, pendidikan dan dakwah. Selain itu juga menguraikan perjuangan Mohammad Natsir dalam lembaga konstituante mengenai ide pembentukan sebuah negara berdasarkan agama Islam. Oleh

karena itu buku ini dapat membantu menganalisis peranan, hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia.

Keempat, buku karangan H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, 1988, *Pak Natsir 80 tahun : Pandangan dan Penilaian Generasi Muda jilid I*, Media Dakwah, Jakarta. Buku ini berisi kumpulan makalah yang dipersembahkan oleh generasi muda untuk memperingati usia Mohammad Natsir yang ke 80 tahun. Buku ini menguraikan pandangan dan penilaian generasi muda terhadap Mohammad Natsir dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan manusia: Islam dan umat Islam dan kaitannya dengan ilmu filsafat, seni, politik, negara, pendidikan, dakwah dan hubungan Internasional. Maka buku ini dapat membantu mengetahui peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958.

Kelima, karangan Adnan Buyung Nasution, 1955, yang berjudul *The Aspiration For Constitution Government In Indonesia 1956-1959 : Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia*, Studi Sosio-legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka Utama Garafiti, Jakarta. Buku ini menguraikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam lembaga konstituante. Oleh karena itu buku ini dapat membantu menganalisis peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik, terutama peran Mohammad Natsir dalam lembaga konstituante untuk memperjuangkan dasar negara Indonesia.

E. Kajian Teori

Dalam skripsi yang berjudul “ Peranan Mohammad Natsir Dalam Bidang Politik di Indonesia tahun 1945-1958”, perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi yaitu peranan dan politik.

Konsep *peranan* berasal dari kata dasar ‘peran’ yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak yang berakhiran-an, maka “*peranan*” dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁶ Peranan juga diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁷ Peranan Mohammad Natsir dalam mempertahankan kemerdekaan membawa perkembangan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam pemerintahan, politik dan keagamaan antara tahun 1945 hingga 1958.

Konsep *politik* adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai ketatanegaraan atau pemerintahan negara terhadap negara lain.⁸ Menurut Miriam Budiarto, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) menyangkut proses penentu tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.⁹ Dan menurut kamus politik, politik adalah beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan, yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem-sistem itu sendiri

⁶ W.J.S.Poerwadarminta 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 506.

⁷ Drs. Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Modern English Press, Jakarta, 1991. hlm. 1132.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 694.

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hlm. 8.

mengenai pelaksanaan.¹⁰ Kata politik dalam skripsi ini berkaitan dengan kegiatan Mohammad Natsir dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1958. Sebelum masuk masuk dalam kegiatan politik pada tahun 1945, Mohammad Natsir sudah terlibat dalam organisasi politik yaitu JIB (*Jong Islamieten Bond*) pada tahun 1923 dan partai politik yaitu PII (Partai Islam Indonesia) pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1945 ia kembali terlibat dalam bidang politik yaitu ikut dalam keanggotaan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Keanggotaannya ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1946 Mohammad Natsir dipilih menjadi Menteri Penerangan hingga tahun 1949. Karena keahliannya dan kecakapannya dalam menciptakan perdamaian politik maka pada tahun 1949 Mohammad Natsir terpilih menjadi ketua umum partai Masyumi hingga tahun 1958 dan pada tahun 1950 ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri hingga tahun 1951.

Berdasarkan judul skripsi peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia antara 1945 hingga 1958 merupakan semangat dan wujud perjuangan Mohammad Natsir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah penelitian.

Hipotesis ini yang dijadikan sebagai bukti dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

¹⁰ B.N.Marbun, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 518-519.

1. Kalau keluarga mendukung dan lingkungan tidak asing dengan politik, maka Mohammad Natsir akan terlibat dalam bidang politik.
2. Kalau Mohammad Natsir aktif dalam bidang politik Ia akan menjadi anggota KNIP dan Menteri.
3. a. Kalau Mohammad Natsir cakap dan ahli dalam menciptakan perdamaian politik maka Ia akan menjadi ketua partai Masyumi.
b. Kalau usahanya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia yang baru merdeka berhasil, maka usahanya akan dilestarikan dalam perkembangan Indonesia selanjutnya.

G. Metode dan Pendekatan

1. Metode.

Skripsi yang berjudul “ Peranan Mohammad Natsir dalam bidang Politik di Indonesia 1945-1958 menggunakan metode penulisan yang berpatokan pada sumber-sumber yang ada. Metode sejarah adalah proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau¹¹

Dengan metode sejarah ini penulis berusaha untuk menguji serta menganalisis atau merekonstruksi sebanyak-banyaknya rekaman masa lampau secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 4 tahap untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yaitu : Heuristik, kritik sumber,

interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah).¹² Keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1). Pengumpulan sumber (heuristik).

Pengumpulan sumber ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang atau saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri dengan panca indra yang lain atau alat mekanik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Sumber sekunder adalah kasaksian dari kesaksian orang lain.¹³

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen, dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan yang ada yaitu Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas IAIN Yogyakarta, Universitas Gajah Mada. Selain dari perpustakaan juga terdapat sumber yang berasal dari internet dan majalah.

2). Kritik sumber

Apabila semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul baik sumber primer maupun sumber sekunder, maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat

¹¹ Louis, Gottchalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto) UI Press Jakarta, 1985. hlm. 32.

¹² *Ibid*, hlm. 35.

¹³ *Ibid*, hlm 34-35.

otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakaslian.¹⁴

Kritik sumber terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan.

Kritik sumber yang digunakan dalam membahas skripsi yang berjudul Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958 adalah buku yang ditulis oleh Ajib Rosidi dengan judul Mohammad Natsir sebuah biografi. Buku ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik. Selain itu masih ada buku pendukung lainnya yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3). Analisis sumber (interpretasi).

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisis sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa.

4). Penulisan sejarah (historiografi)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Tahap ini menggambarkan rentetan peristiwa-peristiwa masa lampau yang didalamnya mengandung aspek kronologis, sehingga dapat

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995, hlm. 99.

memberikan kemudahan dan penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktunya. Pada penelitian ini penulis menggunakan model deskriptif analisis yang mendiskripsikan dan menganalisis peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik 1945-1958.

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, politik, dan personal. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perjuangan bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan

Pendekatan kedua, yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁵ Pendekatan politik digunakan untuk melihat keterlibatan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia setelah kemerdekaan. Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik pasca kemerdekaan dimulai dari keaktifannya dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1945, Menteri Penerangan pada tahun 1946-1949, ketua umum partai Masyumi tahun 1949-1958 dan sebagai Perdana Menteri tahun 1959-1961.

Pendekatan ketiga, ialah pendekatan personal. Pendekatan personal digunakan untuk melihat latar belakang keluarga, latar belakang

¹⁵ Deliar Noer, *Pengantar Kepemimpinan Politik*, Dwipa, Medan, 1965, hlm. 6.

pendidikan dan watak dan kepribadian Mohammad Natsir. Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perilaku dan latar belakang kehidupan Mohammad Natsir

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “ Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958 ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan, sistematika penulisan.

Bab II. Berupa uraian tentang faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik pada masa kemerdekaan, yang diawali latar belakang keluarga, pendidikan dan watak dan kepribadian Mohammad Natsir.

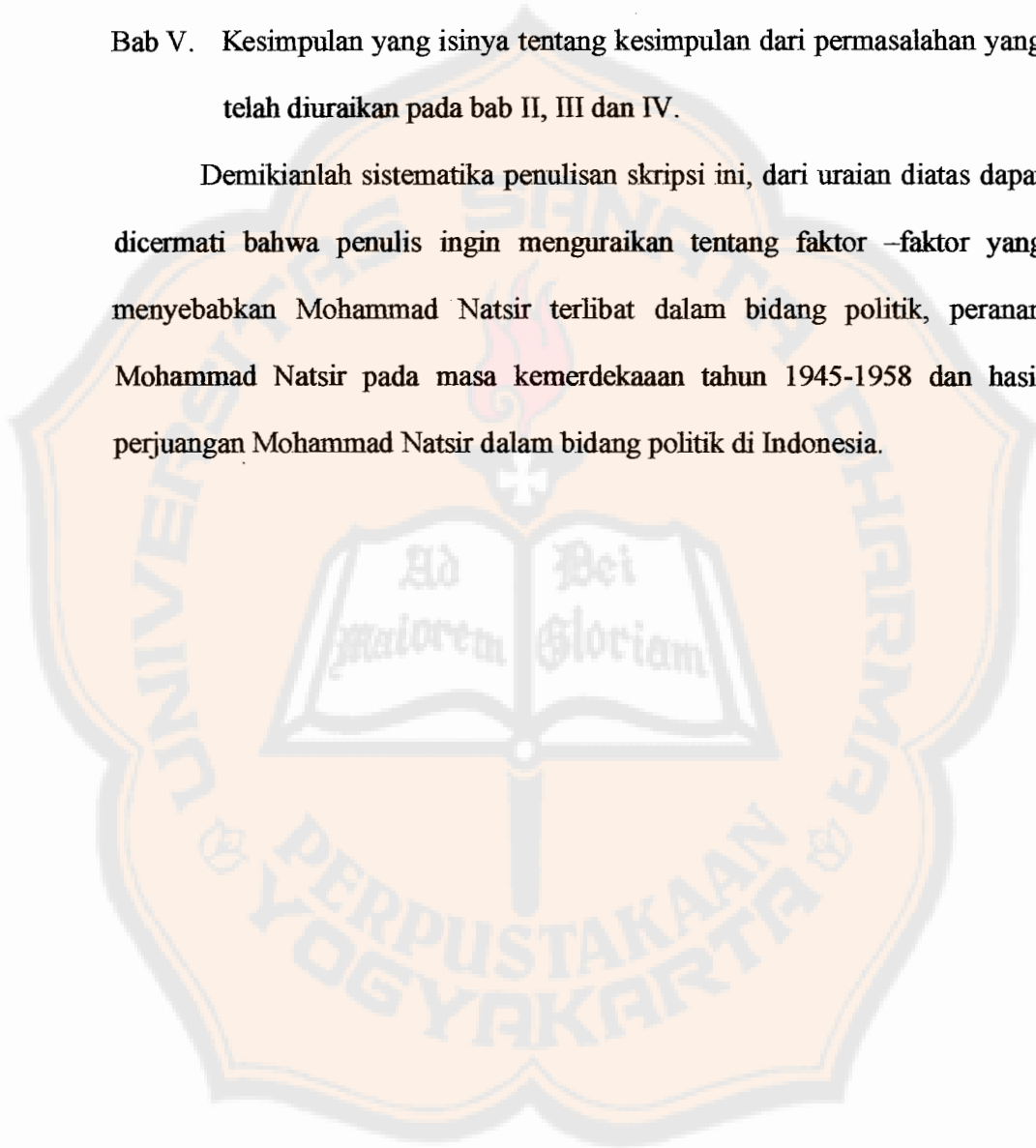
Bab III. Berupa uraian mengenai peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik dari tahun 1945 sampai tahun 1958, yang diawali dari Mohammad Natsir menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) tahun 1945, menjabat sebagai Menteri Penerangan tahun 1946-1949, menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1950-1951, menjabat sebagai ketua partai Masyumi 1949-1958

Bab IV. Berupa uraian tentang hasil Perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia. Bab ini akan membahas hasil perjuangan

Mohammad Natsir dalam membangun Kementerian Republik Indonesia, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meningkatkan perekonomian Indonesia ketika menjabat sebagai Perdana Menteri.

Bab V. Kesimpulan yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian diatas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang faktor –faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik, peranan Mohammad Natsir pada masa kemerdekaan tahun 1945-1958 dan hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MOHAMMAD NATSIR TERLIBAT DALAM BIDANG POLITIK

A. Faktor Keluarga

Mohammad Natsir dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Ia lahir dari seorang wanita yang bernama Khadijah.¹ Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado yang bekerja sebagai juru tulis pada kantor kontroler di Maninjau, kemudian dipindahkan menjadi asisten demang di Bonjol Sumatera Barat dan akhirnya dipindahkan ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir yaitu penjaga tahanan.

Menurut adat Minangkabau seorang anak laki-laki setelah menikah mendapat gelar. Gelar yang diperoleh Mohammad Natsir adalah Datuk Sinaro Panjang.² Di tempat kelahirannya Mohammad Natsir melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Di sini ia dididik untuk hidup menjadi orang yang mandiri dan dewasa menurut agama dan ilmu pengetahuan. Mohammad Natsir dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang pandai dan yang taat beragama, karena kakeknya ayah dari Sutan Saripado

¹ Luth Thohir, M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 9.

² Pengangkatan gelar pusaka ini diberikan kepada M. Natsir setelah menikah. Nama ini merupakan adat minangkabau bahwa gelar tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerimanya secara turun temurun setelah yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, walaupun tidak selamanya demikian. Lihat, Yusuf A. Puar, *M. Natsir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan Perjuangan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1978, hlm. 2.

adalah seorang ulama besar di Minangkabau, sehingga ia dituntut untuk mendalami agama Islam secara baik dan benar. Walaupun demikian ia tidak hanya mendalami agama Islam tetapi juga mendalami ilmu pengetahuan khususnya politik dari seorang tokoh politik K.H. Agus Salim.

Mohammad Natsir adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Mereka adalah Yukinan, Rubiah, Mohammad Natsir dan Yohanusun.³ Ketiga saudara Mohammad Natsir ini bekerja sebagai pegawai di pemerintahan. Bakat kepemimpinan yang dimiliki Mohammad Natsir berasal dari ayahnya yang pernah menjabat sebagai asisten demang di Bonjol Sumatera Barat. Oleh karena itu Mohammad Natsir mempunyai semangat yang kuat untuk aktif dalam bidang politik. Keaktifannya ini dapat terwujud ketika ikut dalam organisasi JIB pada tahun 1920 dan partai politik yaitu PII (Partai Islam Indonesia) pada tahun 1930.

Hubungan keluarga Mohammad Natsir dengan politik terlihat dari semua keluarga yang menginginkan Mohammad Natsir menjadi orang yang mempunyai ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi khususnya ilmu politik, sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Dukungan dari keluarga ini Mohammad Natsir mempunyai semangat kuat untuk terus membangun bangsa Indonesia baik itu dalam bidang pendidikan, pemerintahan maupun agama.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik ditinjau dari

³ Solihin Salam, *Wajah Nasional*, Pusat Studi dan Penelitian Islam, Jakarta, 1990, hlm. 131.

faktor keluarga adalah berasal dari keluarga yang merupakan orang-orang yang cerdas dan termasuk golongan terpelajar serta banyak yang menjadi pegawai pemerintahan. Selain itu adanya bakat yang diperoleh dari ayahnya yang pernah bekerja sebagai asisten demang di Bonjol Sumatera Barat. Oleh karena itu Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik.

B. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal pertama yang ditempuh oleh Mohammad Natsir adalah sekolah rakyat kelas II di Maninjau yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Di sekolah tersebut Mohammad Natsir hanya duduk sampai kelas dua, karena ayahnya dipindahkan ke Bekeru, Sumatera Utara. Kemudian Mohammad Natsir dibawa Makcik Ibrahim ke Padang untuk melanjutkan sekolah di HIS milik Belanda, namun sekolah ini menolak Mohammad Natsir dengan alasan hanya pegawai rendahan dengan gaji kecil yang kurang dari F.70 sebulan, sedangkan yang diterima di sekolah itu adalah anak pegawai negeri yang gajinya minimal F.70 sebulan atau anak saudagar yang kaya raya.⁴

Walaupun demikian Mohammad Natsir tetap mengenyam pendidikan, karena pada saat itu di Padang didirikan sekolah Partikelir HIS Adabiyah pada tanggal 23 agustus 1915 oleh syarikat usaha yang dipimpin oleh H. Abdulah Ahmad bersama dengan kawan-kawannya. HIS Adabiyah tersebut didirikan dengan isi dan bentuk yang berbeda dengan HIS

⁴ Ajibh Rosidi, *M. Natsir sebuah Biografi*, PT. Girimukti Pasaka, Jakarta, 1990, hlm. 145.

Pemerintah. Sekolah ini terbuka untuk semua anak dari segenap golongan dalam masyarakat, terutama golongan tani, pedagang dan buruh kecil yang tidak dapat masuk pada sekolah pemerintah.

Pendidikan di HIS ditempuhnya antara tahun 1916 dan 1923 di tiga tempat yaitu pertama, HIS Adabiyah di Padang, kedua HIS Pemerintah di Solok dan yang ketiga HIS Padang yang pernah menolaknya. Di HIS Adabiyah ini Mohammad Natsir tinggal bersama mamaknya yaitu Ibrahim, di sini ia mulai belajar mengarungi hidup menjadi orang yang mandiri dan dewasa. Setiap hari kira-kira pukul setengah enam setelah sholat, Mohammad Natsir sudah mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menanak nasi, membersihkan rumah, menimba air dan pada sore hari mencari kayu bakar ke laut, serta mengerjakan tugas lainnya. Walaupun demikian Mohammad Natsir merasa bahagia. Ia sadar bahwa rasa bahagia itu tidaklah terletak pada kemewahan dan keadaan yang cukup, tetapi rasa bahagia itu lebih banyak timbul dari kepuasan serta dari hati yang tidak tertekan dan bebas, berani mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, tidak mengalah terhadap keadaan, tidak putus asa dan percaya kepada kekuatan yang ada pada diri sendiri.⁵

Mohammad Natsir mengalami peralihan dalam hidupnya. Ia pindah sekolah dari sekolah swasta HIS Adabiyah ke sekolah HIS Pemerintah di Solok, Sumatra Barat. Peralihan ini terjadi karena pekerjaan ayahnya Mohammad Idris Sutan Saripado dipindahkan ke Alahan Panjang. Di HIS

⁵ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit.*, hlm. 4.



Solok Mohammad Natsir diterima di kelas II atas dasar pertimbangan kepandaianya.

Di Solok Mohammad Natsir tinggal di rumah seorang saudagar yang bernama Haji Musa. Ia memiliki seorang anak yang bernama Ubaidillah. Selain sekolah di HIS Mohammad Natsir juga sekolah di Diniyah yaitu sekolah agama yang mengajarkan ilmu agama Islam seperti mengaji. Bersama Ubaidillah Mohammad Natsir belajar di sekolah Diniyah. Di sekolah itu ia diajarkan bahasa Arab dan mengaji fiqh atau hukum Islam. Setelah duduk di kelas tiga Diniyah Mohammad Natsir diminta menjadi guru bantu untuk kelas I, karena pada saat itu sekolah ini kekurangan guru.

Pada tahun 1920, Mohammad Natsir dipindahkan sekolahnya ke HIS Padang oleh kakaknya yang bernama Rubiah. Di sekolah HIS Padang Mohammad Natsir langsung diterima sebagai murid, karena ia merupakan siswa pindahan dari HIS Solok. Mohammad Natsir sangat senang karena dapat masuk HIS Padang yang dulu pernah menolaknya dengan alasan gaji orang tua yang rendah. Tiga tahun Mohammad Natsir sekolah HIS di Padang yaitu dari kelas lima sampai kelas tujuh.⁶

Setelah tamat dari HIS Padang, Mohammad Natsir melanjutkan sekolah MULO (*Meer Uitdebreid Lager Onderwijs*) di Padang yang paling tinggi tingkatannya. Ia masuk sekolah MULO ini melalui jalur beasiswa yang diperolehnya sebesar F.20 sebulan. Di sekolah itu Mohammad Natsir mulai mengenal suatu organisasi. Pada mulanya ia masuk *Jong Sumatranen Bond*

⁶ *Ibid*, hlm. 6.

Midelbare School. Afdelling II) di Bandung dengan beasiswa yang diperolehnya dari Pemerintah Belanda sebesar F.30 sebulan. Pada saat itu ia masih berumur 19 tahun, di mana dalam usia yang masih muda ini Mohammad Natsir meninggalkan kota kelahiran dan kedua orang tuanya yaitu Mohammad Idris Sutan Saripado dan Kadijah untuk menempuh pendidikan di Bandung.

AMS adalah sekolah menengah yang memberikan pelajaran bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Ketika melanjutkan sekolah di AMS Mohammad Natsir tinggal di rumah tante Latifah yang tidak jauh dari sekolahnya. Menurut banyak orang kota Bandung sering disebut sebagai Parijs Van Java, tetapi menurut Mohammad Natsir kota Bandung bukanlah kota Parijs yang merupakan tempat orang bersenang-senang melainkan tempat memulai perjuangannya.

Kesan pertama Mohammad Natsir belajar di AMS adalah sangat senang, namun ia mempunyai masalah dengan penggunaan bahasa Belanda yang belum lancar seperti teman-temannya sekelas yang berasal dari pulau Jawa. Walaupun demikian ia tidak putus asa untuk terus belajar. Sebagai anak yang pandai Mohammad Natsir mempunyai ide untuk belajar bahasa Belanda kepada kakak tingkatnya.

Kemudian ia berkenalan dengan Bakhtiar Efendi yang pada saat itu duduk di kelas empat. Bakhtiar Efendi adalah anak yang pandai berdeklamasi dengan menggunakan bahasa Belanda. Setelah mendapat ilmu dari Bakhtiar Efendi akhirnya Mohammad Natsir berhasil menguasai bahasa Belanda

(Sarikat Pemuda Islam) yang diketuai oleh Sanusi Pane. Dan ketika ia akan naik kelas dua, muncul organisasi baru yaitu *Jong Islamieten Bond* (Sarikat Pemuda Islam) yang juga diketuai juga oleh Sanusi Pane, ia pun menjadi salah satu anggotanya.⁷

Anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang Indonesia saja, padahal di MULO Padang banyak juga anak-anak Belanda yang belajar. Pada umumnya mereka bersikap sombong dan sering menghina murid-murid Indonesia dengan sebutan *Inlanders* yang artinya bumi putera yang kotor-kotor. Keadaan ini membuat sekolah MULO Padang sering terjadi perkelahian antara anak-anak Indonesia dan Belanda. Tentu saja perkelahian ini akhirnya menjadi urusan guru-guru dari Belanda, di mana mereka mengoreksi tingkah laku yang terlampau congkak dan sombong dari anak-anak Belanda, tetapi dilihat dari segi politik ada guru yang bersikap buruk dan mempersalahkan atau menghina anak-anak Indonesia, sehingga perkelahian ini tidak ada penyelesaiannya.

Walaupun Mohammad Natsir tidak pernah terlibat dalam perkelahian ini, tetapi ia merasa tidak senang bila mendengar hinaan dari anak-anak Belanda terhadap anak-anak Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan kesadarannya untuk mulai melihat kepincangan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Setelah tamat dari sekolah MULO pada bulan Juli tahun 1927, Mohammad Natsir melanjutkan pendidikannya ke AMS bagian A (*Algememe*

⁷ Ajib Rosidi, *op. cit*, hlm. 151.

dengan baik. Sedangkan pelajaran bahasa Latin Mohammad Natsir berhasil menguasai dengan baik pula. Ini semua dilakukan dengan kerja keras.

Setelah naik ke kelas 5 A, Mohammad Natsir mendapat pelajaran tentang pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di pulau Jawa. Pelajaran ini sangat menantang untuk melakukan penelitian. Selama tiga minggu Mohammad Natsir membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Gedung Sate di Bandung tentang pabrik gula, dikumpulkannya pula majalah-majalah yang diterbitkan oleh kaum pergerakan dan kemudian dipelajarinya perdebatan dalam *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat) di Betawi. Setelah semua bahan dan gambaran diperoleh, maka tinggal menulis dalam sebuah karangan yang menganalisis angka-angka statistik tentang nasib rakyat di pulau Jawa di daerah-daerah tempat pabrik gula.

Hasil dari penelitiannya ini tidak mengecewakan, walaupun ia tidak mendapat pujian dari guru yang bersangkutan tetapi di sini Mohammad Natsir bisa melihat penderitaan yang dialami rakyat Indonesia, khususnya Jawa di bawah sistem penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat ia tertarik untuk terlibat dalam dunia politik. Ketertarikannya dalam bidang politik ini lebih terlihat lagi ketika Mohammad Natsir sering secara sengaja mendiskusikan soal-soal politik bersama teman-temannya, seperti kalau ada berita-berita hangat mengenai kaum pergerakan kebangsaan yang dimuat dalam surat kabar atau majalah, kalau ada rapat-rapat umum yang diselenggarakan oleh partai-partai politik atau organisasi pergerakan

nasional, ia pun sering menyelinap mendengarkan pidato-pidato yang disampaikan Soekarno selaku ketua PNI.

Di sekolah AMS Bandung ini, Mohammad Natsir belajar agama secara mendalam dan berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah dan pendidikan.⁸ Ia banyak belajar agama dari Ahmad Hassan yang selalu mendampingi setiap saat dan sangat mempengaruhi alam pikirannya. Ia sangat mengagumi Tuan Hassan karena kesederhanaannya, kerapian kerjanya, kealimannya dan ketajamannya bila bertukar pikiran. Selain itu Mohammad Natsir juga mulai tertarik pada pergerakan Islam yaitu Pembela Islam dan belajar politik pada perkumpulan JIB (*Jong Islamieten Bond*). Perkumpulan ini adalah sebuah organisasi pemuda Islam yang anggotanya adalah pelajar-pelajar bumi putra yang bersekolah di sekolahan Belanda.⁹ Organisasi ini didirikan oleh Haji Agus Salim bersama dengan Wiwoho Purbohadijoyo dan Syamsurijal

Pada organisasi ini Mohammad Natsir mulai mengadakan ceramah-ceramah tentang Islam menggunakan bahasa Belanda, agar lebih dapat diterima dan dipahami dengan baik. Pada organisasi ini pula Natsir bergaul dengan tokoh nasional, seperti, Mohammad Hatta, Prawoto Mangunsasmita, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto, Mr Kasman Singodimejo dan Mohamad Roem.¹⁰ Dan di sini pulalah Mohammad Natsir berkenalan dengan Nur Nahar, seorang pemuda anggota JIB yang akhirnya menjadi istrinya.

⁸ Luth Thohir. *op.cit.* hlm. 23.

⁹ *ibid*, hlm 22.

¹⁰ Ajib Rosidi, *op.cit.*, hlm. 52.

Ketika Mohammad Natsir sudah duduk di kelas 6 AMS, ia membuat tulisan tentang pengajaran shalat dalam bahasa Belanda dengan judul *Komttot het gebed*.¹¹ Tulisan ini digunakan untuk pedoman mengajar Islam di sekolah menengah. Kepandaiannya ini membawa keberhasilan karena pada tahun 1930 ia mendapatkan izasah AMS Afdeling II dengan nilai yang baik.

Setelah menyelesaikan sekolahnya, Mohammad Natsir mulai aktif dibidang politik. Ia masuk menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) caabang Bandung. Oleh karena kecakapan dan keahliannya maka ia ditunjuk sebagai ketua PII pada tahun 1940.

Hubungan pendidikan Mohammad Natsir dengan politik adalah lingkungan pendidikan yang mengarahkan terlibat dalam politik. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam organisasi JIB yang mengajarkan ilmu politik dan ketertarikannya dalam pidato-pidato yang disampaikan Presiden Soekarno dan ia juga melihat penderitaan yang dialami rakyat Indonesia dibawah kekuasaan penjajah.

Dari uraian di atas faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik ditinjau dari pendidikan adalah keaktifannya dalam organisasi JIB (*Jong Islamieten Bond*) ketika sekolah di HIS, MULO dan AMS. Selain itu setelah menyelesaikan sekolahnya Mohammad Natsir melibatkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1930.

¹¹ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 19.

C. Watak dan Kepribadiannya

Dalam kehidupan sehari-hari Mohammad Natsir adalah orang yang sederhana ini terlihat dari caranya berpakaian yang sederhana dan kesukaan hidup yang sederhana. Di rumah ia tidak pernah memakai piama tetapi memakai baju gunting Cina dan rambutnya tidak pernah diberi minyak sehingga bila tutup kepalanya (Peci) dibuka, maka akan terlihat rambutnya yang kusud dan berantakan.

Mohammad Natsir pada usia delapan tahun sudah diajarkan untuk mengikuti tradisi yang berlaku di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa anak laki-laki pada malam hari tidak boleh tidur di rumah, tetapi bersama teman-teman sebaya. Kebiasaan ini pun menjadi aturan bagi semua anak laki-laki termasuk Mohammad Natsir, sehingga pada malam hari ia tidak pernah berada di rumah tetapi berkumpul bersama teman-teman sebayanya. Kebiasaan ini membuat Mohammad Natsir tidak merasa takut untuk berpisah dengan ayah dan ibunya.

Pada usia 8 tahun Mohammad Natsir telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Ia tinggal bersama makciknya di Padang untuk mengenyam pendidikan. Sejak tinggal bersama makciknya, Mohammad Natsir menjadi dewasa dan mandiri, di mana ia telah belajar mengerti artinya tanggung jawab dan arti saling berbagi hidup dengan sesama. Hal ini disebabkan makciknya tidak pernah memanjakannya tetapi menganggapnya sebagai orang yang sudah dewasa.

Mohammad Natsir diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal dalam arti bahwa makciknya tidak pernah melarang atau menyuruhnya untuk bekerja. Keadaan ini membuat Mohammad Natsir melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak seumurnya, misalnya memunggut kayu bakar di pantai, memasak, menyapu, mencuci dan lainnya. Meskipun Mohammad Natsir tidak pernah dilarang tetapi ia tidak pernah melakukan perbuatan nakal seperti beberapa teman sebayanya, karena ia merasa lebih baik belajar di rumah dari pada melakukan hal-hal yang tidak berguna.¹²

Mohammad Natsir adalah anak yang pintar dan disenangi oleh teman-temannya, sehingga ia selalu memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda. Pada saat Mohammad Natsir mengenyam pendidikan di MULO, ia mulai mengenal organisasi JIB (*Jong Islamieten Bond*) yaitu organisasi para pelajar sekolah menengah yang berasaskan Islam. Organisasi ini didirikan oleh beberapa anggota Jong Java (pemuda Jawa).

Sejak mengenal JIB ini, Mohammad Natsir merasakan betul manfaat akan organisasi, karena dapat memberikan bekal pengalaman untuk kemudian terjun dalam masyarakat. Selain itu melatihnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Organisasi ini juga memberikan kesempatan untuk lebih mengenal orang lain yang berada di luar sekolah.¹³ Oleh karena itu Mohammad Natsir selalu mengadakan kegiatan untuk memperdalam dan menyebarkan kesadaran akan ajaran agama Islam, yaitu

¹² Ajib Rosidi, *op.cit*, hlm. 148.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

dengan memberikan ceramah-ceramah dan bimbingan bagi para anggota yang masih rendah pengetahuan dan kesadarannya akan agama Islam.

Mohammad Natsir adalah pemimpin politik ahli filsafat. Hal ini dapat dilihat dari filsafat politiknya yang berbeda dengan orang lain yaitu lebih menekankan dasar kejujuran. Carilah kemenangan dalam politik tetapi musuh tidak merasa dikalahkan, demikianlah filsafatnya.¹⁴

Mohammad Natsir adalah orang yang mempunyai sifat yang tenang dan berhati-hati, sabar, berani, tidak terburu nafsu, pemurah, tidak pemaarah tetapi tidak mau kalah. Ia merupakan penerus bangsa yang patut dicontoh oleh para kaum muda Indonesia sekarang ini.

Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik disebabkan oleh keadaan keluarga yang mendukung dan lingkungan yang tidak asing dengan politik. Keluarga Mohammad Natsir adalah orang terpelajar, cerdas, taat beragama dan banyak yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Selain itu jiwa kepemimpinan Mohammad Natsir merupakan turunan dari ayahnya yang pernah menjadi asisten demang di Bonjol Sumatera Barat. Sedangkan dalam lingkungan yang tidak asing dengan politik, Mohammad Natsir selalu mengikuti pidato-pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai ketua PNI dan pernah melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat di Jawa akibat perlakuan penjajah Belanda serta Mohammad Natsir aktif juga dalam partai politik yaitu partai Islam Indonesia (PII). Oleh karena itu Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik. Kehidupan yang sederhana,

¹⁴ ST.Rais Alamsjah,*op.cit*, hlm. 83.

pemurah, sabar, berani, tenang dan bijaksana membuatnya banyak disenangi dan dikagumi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya.



BAB III

PERANAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG POLITIK

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai hidup baru dengan membangun kembali keadaan sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai pemuda-pemudi yang mampu untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik dalam segala segi kehidupan. Salah satu dari pemuda pemudi tersebut adalah Mohammad Natsir.

Sejak muda Mohammad Natsir sudah berkecimpung dalam dunia politik, yaitu *Jong Islamieten Bon* (JIB) dan Partai Islam Indonesia (PII). Organisasi JIB adalah perkumpulan pemuda-pemuda Islam yang ingin menanamkan ajaran Islam pada semua orang sedangkan PII adalah partai politik yang juga berusaha memperjuangkan Islam. Setelah Indonesia merdeka, Mohammad Natsir terlibat lagi dalam dunia politik, yaitu menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada bulan September 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946, ia diangkat menjadi Menteri Penerangan pada masa kabinet Syahrir, namun tidak bertahan lama karena pada tanggal 29 Januari 1948 Mohammad Natsir menjadi Menteri Penerangan pada masa kabinet Hatta.

Sebagai orang yang taat pada ajaran agama dan selalu menanamkan ajaran Islam pada semua orang maka Mohammad Natsir diangkat menjadi ketua partai Masyumi pada tahun 1949. Sebagai pimpinan politik Islam Mohammad Natsir telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara.

Hal ini dibuktikan melalui apa yang disebut Mosi Integral Natsir yang mengantarkan masing-masing negara bagian untuk bersatu kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkat Mosi ini Mohammad Natsir mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri dalam kabinet pertama Indonesia, yaitu kabinet Natsir pada tahun 1950. Jabatannya sebagai Perdana Menteri tidak bertahan lama dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1951. Setelah turun jabatannya dari Perdana Menteri, Mohammad Natsir aktif dalam lembaga konstituante. Dalam lembaga ini Ia memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara pada tahun 1958.

A. Peranan Mohammad Natsir dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1946

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia telah menetapkan Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Kemudian tindak lanjutnya adalah mengadakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945, namun dalam rapat ini tidak mencapai kata sepakat. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini, pada tanggal 25 Agustus 1945 para pemuda memutuskan untuk membentuk KNIP lagi dan pada tanggal 29 Agustus 1945 KNIP diresmikan oleh Presiden RI di gedung Komidi Jalan Kantor Pos Pasar Baru Jakarta.

Keanggotaan KNIP berjumlah 131 orang di antaranya, yaitu:¹

1. Ketua : Mr. Kasman Singodimejo
2. Ketua I : Soetardjo
3. Ketua II : Mr. Latuharhary
4. Ketua III : Adam Malik

Dari 131 anggota hanya 15 orang yang mewakili Islam, yaitu Abikusno Tjokrosujoso, Kasman Singgodimejo, Yusuf Wibisono, Dahlan Abdullah, Mohammad Roem, A.R. Baswedan, A. Bajasut, Harsono Tjokroaminoto, Ny.Sunarjo Mangun Puspito, Wahit hasjim, Ki bagus hadikusumo, Zainaul Arifin, Agus Salim, A. Sanusi, Anwar Tjokroaminoto

Sejak awal Mohammad Natsir memang sudah pernah terlibat dalam sebuah organisasi yaitu JIB (*Jong Islamieten Bond*), dimana organisasi ini terdiri dari kumpulan orang-orang Islam yang ingin memperjuangkan agamanya. Dalam organisasi ini Mohammad Natsir tidak hanya mengurus masalah-masalah sosial dan pendidikan tetapi juga politik, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri dari politik. Selain itu Mohammad Natsir juga aktif dalam partai politik yaitu PII (Partai Islam Indonesia) pada tahun 1930 Oleh karena itu sebagai seorang tokoh muslim dan aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik ia mulai aktif dalam anggota KNIP pada bulan September 1945.²

Pada permulaan bulan Oktober 1945, KNIP mengadakan sidang di Gedung pertemuan Muslim Jalan Kramat Raya Jakarta. Sidang ini membahas

¹ Slamet Mulyana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Jilid II*, Balai Pustaka, 1969, Jakarta, hlm. 195-196.

² M.Natsir, *Politik melalui Jalur Dakwah*, Tempo 2 Desember 1989, hlm. 54.

mengenai perlunya dilakukan perubahan pada sifat Komite Nasional Indonesia, dengan mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer dengan kekuasaan legislatif yang sebenarnya berada ditangan KNIP. Dalam sidang ini para pemuda yang menjadi anggota mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyerang dan mengkritik pemerintah dan pemimpin KNI yang tidak berbuat apa-apa. Keadaan ini membuat wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan maklumat X 16 Oktober 1945 yang isinya, yaitu:³

1. Bahwa untuk kepentingan lancarnya pekerjaan, maka ditunjuk oleh pemerintah dari anggota KNIP sebuah badan pekerja yang ditugaskan menjalankan pekerjaan sehari-hari.
2. Bahwa kepada KNIP dilimpahkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yakni melaksanakan kedaulatan dan menetapkan garis-garis besar haluan negara selama MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dibentuk dengan pemilihan umum.

Maklumat Mohammad Hatta ini membawa perubahan yang sangat baik bagi KNIP, di mana KNIP diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan KNIP tersebut juga membawa perubahan terhadap pemimpin dan perluasan keanggotaan Komite Nasional. Hal ini terlihat dari terpilihnya Sutan Syahrir menjadi ketua KNIP membuat keanggotaan KNIP bertambah menjadi 232 orang.

³ Osman Rabily, *Dokumenta Historica*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953, hlm. 511.

Kemudian pada tanggal 25 November 1945 KNIP mengadakan rapat kembali untuk membentuk Badan Pekerja KNIP. Dalam rapat ini Mohammad Natsir dilibatkan sebagai ketua panitia untuk menyusun badan pekerja sebanyak 25 orang. Hubungan Mohammad Natsir dengan KNIP hanya sebagai anggota saja yang membantu Presiden dan wakil Presiden dalam menjalankan tugas di pemerintahan.

B. Peranan Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan tahun 1946-1949

Mohammad Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam dua periode, yaitu periode pertama pada masa Kabinet Syahrir pada tahun 1946 sampai 1947 dan periode kedua pada masa Kabinet Hatta pada tahun 1948 sampai 1949. Jabatan Menteri Penerangan pada masa Kabinet Syahrir merupakan rekomendasi dari Sutan Syahrir yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Mohammad Natsir menjadi Menteri Penerangan RI. Soekarno menerima usul itu, karena Mohammad Natsir adalah orang yang cocok dan mempunyai kemampuan untuk menjalani tugas ini. Soekarno juga mengatakan "*Hij Is de man*" yang artinya inilah orangnya.⁴ Akhirnya pada tanggal 3 Januari 1946 Mohammad Natsir ditunjuk menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Syahrir I. Hal ini menandakan berakhirnya masa jabatan Mohammad Natsir sebagai anggota KNIP.

⁴ Yusuf Abdullah Puar, *M. Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1978, hlm. 78.

Pada masa awal jabatannya, Mohammad Natsir ditempatkan di gedung bekas kantor KNIP. Kantor ini terdiri dari dua tingkat yaitu lantai I untuk kantor KNIP dan lantai II untuk kantor Menteri Penerangan. Kemudian kantor penerangan dipindahkan ke Yogyakarta karena Yogyakarta menjadi Ibu kota Republik. Di Yogyakarta ini Mohammad Natsir mengusulkan untuk membentuk Kementerian Penerangan dengan staf yang lengkap dan gedung yang lebih besar. Usul ini mendapat izin dari Presiden dan menetapkan kantor Kementerian Penerangan berada di jalan kali code Yogyakarta

Tugas Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan adalah membuat pidato 17 Agustus untuk Soekarno yang akan dibacakan ke seluruh rakyat Indonesia. Semua pidato tersebut dibuat Mohammad natsir menurut gaya bahasa sendiri. Dan bila ada statemen-statemen penting seperti Uni Indonesia Belanda dan lainnya Mohammad Natsir selalu dilibatkan.

Selama menjabat Menteri Penerangan pada kabinet Syahrir Mohammad Natsir mengalami pasang surut, hal ini terlihat dari masa jabatan yang tidak bertahan lama. Jabatannya sebagai Menteri Penerangan pada kabinet Syahrir I yang hanya berlangsung kurang dari dua bulan (1 bulan 25 hari) karena adanya tekanan-tekanan dari organisasi yang menamakan dirinya sebagai persatuan perjuangan dibawah pimpinan Tan Malaka yang jumlahnya lebih dari 137 Organisasi. Hal ini Sutan Syahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kemudian pada tanggal 2 Maret 1946, Mohammad Natsir kembali menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir II. Namun masa jabatannya

ini juga tidak bertahan lama, karena adanya tekanan dari Masyumi (Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara) dan organisasi persatuan perjuangan yang menolak Syahrir menjadi Perdana Menteri. Semua hambatan ini membuat program-program yang telah dirancang dalam Kabinet Syahrir II tidak berjalan secara efektif.

Puncak tekanan terhadap Kabinet Syahrir II terjadi ketika Perdana Menteri Syahrir diculik dan bersamaan dengan itu meletus apa yang disebut sebagai peristiwa 3 Juli 1946, di mana ketika itu persatuan perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan. Pada peristiwa ini Presiden dipaksa untuk menandatangani susunan pemerintahan. Isinya adalah .⁵

1. Agar Presiden memberhentikan semua menteri dalam kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin.
2. Agar Presiden menyerahkan kekuasaannya dibidang militer kepada Panglima besar angkatan perang, serta dibidang politik, ekonomi dan sosial kepada dewan pimpinan politik yang anggotanya segera akan diumumkan.

Peristiwa ini dilakukan oleh organisasi persatuan perjuangan sebagai usaha untuk membubarkan Kabinet Syahrir. Akhirnya peristiwa ini membawa pengaruh bagi Kabinet Syahrir, sehingga Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno.

Setelah Kabinet Syahrir II dibubarkan, Presiden Soekarno kembali menunjuk Syahrir untuk menyusun kabinet baru pada tanggal 2 Oktober 1946.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *30 tahun Indonesia merdeka 1945-1949*, PT.Citra Lamtoro Agung Persada, Jakarta, 1986, hlm. 99.

Dalam Kabinet Syahrir III ini, Mohammad Natsir kembali menjadi Menteri Penerangan. Kabinet ini terdiri dari 30 anggota dan bersifat Nasional,⁶ termasuk di dalamnya enam orang anggota Masyumi. Namun mereka ini bukan mengatasnamakan partai melainkan bersifat perorangan.

Pada masa Kabinet Syahrir III ini Indonesia dan Belanda mengadakan persetujuan Linggajati. Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Linggajati (Cirebon). Persetujuan ini sangat ditentang oleh Masyumi karena banyak dari anggota Masyumi yang beranggapan bahwa banyak bagian persetujuan tersebut menimbulkan keraguan dan menyebabkan tafsiran yang berbeda dari kedua belah pihak. Penolakan ini berkenaan dengan pembentukan Uni Indonesia-Belanda serta badan-badannya : pengembalian harta benda dan milik dari orang-orang asing dalam wilayah Republik kepada pemilik lamanya.⁷

Sikap Masyumi yang menolak persetujuan Linggajati ini membuat Syahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 27 Juni 1947 dan Masyumi berpendirian bahwa persetujuan Linggajati tidak berguna serta membahayakan kemerdekaan negara. Setelah Kabinet Syahrir III dibubarkan, pada tanggal 2 Juli 1947 Presiden menunjuk Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pada kabinet ini tidak terdapat menteri yang berasal dari Masyumi termasuk Mohammad Natsir. Ia tidak bersedia menjabat sebagai Menteri Penerangan, sehingga Kementerian Penerangan pindah ke tangan orang lain yaitu Ir. Setiadi dari golongan kiri. Namun kabinet ini tidak

⁶ Deliar Noer, *Partai islam Di Pentas Nasional*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987, hlm. 163.

⁷ *Ibid*, hlm. 165.

bertahan lama, karena Amir Syarifuddin gagal dalam menjalankan programnya. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno

Masalah-masalah yang ditinggalkan Kabinet Amir Syarifuddin membuat pemerintah menjadi goncang, maka untuk mengatasinya Presiden menunjuk wakil Presiden Mohammad Hatta membentuk kabinet pada tanggal 29 Januari 1948. Kabinet ini disebut sebagai Kabinet Hatta dengan programnya sebagai berikut :⁸

- a. Berunding atas dasar "Renville"
- b. Mempercepat Pembentukan NIS
- c. Rasionalisasi dan Rekontruksi
- d. Pembangunan.

Dalam kabinet ini Mohammad Natsir kembali memimpin Departemen Penerangan sebagai Menteri Penerangan. Sebagai Menteri Penerangan Mohammad Natsir turut memikul berbagai tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dan mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia seperti masalah perjanjian Renville, pemberontakan PKI di Madiun 1948, agresi militer Belanda kedua 1949 dan munculnya gerakan Islam, yaitu Darul Islam.

Perjanjian antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville, sehingga perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini telah menempatkan

⁸ A.H. Nasution, *Tentara nasional Indonesia Jilid III*, cetakan pertama, Seruling Massa, Jakarta, 1986, hlm. 129.

Republik Indonesia pada posisi sulit, di mana perjanjian ini membuat wilayah kekuasaan RI menjadi semakin sempit sehingga menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia.

Setelah perjanjian Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda, ketegangan semakin bertambah dengan terjadinya insiden pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 19 September 1948. Pemberontakan ini merupakan langkah awal untuk merebut seluruh pemerintahan Indonesia yang berada ditangan Soekarno dan Hatta. Kemudian untuk mengatasi masalah ini Indonesia menempatkan TNI yaitu dengan menugaskan Divisi Siliwangi dipimpin oleh kolonel Sadikin dan Divisi Brawijaya dipimpin oleh Mayor Jonosewojo untuk merebut kembali Madiun.

Akhirnya pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil di rebut kembali dan terbebas dari tangan pemberontak. Sedangkan para tokoh-tokoh PKI di tangkap, antara lain Muso yang tertembak mati di Somoroto, kabupaten Magetan, karesidenan Madiun Jawa Timur dan Amir Syarifuddin beserta Soeripno tertangkap.

Masalah PKI belum dapat terselesaikan dengan tuntas, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua yang menyebabkan jatuhnya wilayah RI, seperti Jawa, Sumatera, Madura dan ibukota RI yaitu Yogyakarta. Sebelum Belanda melancarkan agresi besar-besaran ini pemerintah menerima undangan Perdana Menteri India untuk menjemput Presiden Soekarno dan Mohammad Natsir dengan pesawat. Pada saat itu pula Mohammad Natsir bersama Hatta dan lainnya siang dan malam

bekerja keras mengadakan rapat, tetapi karena tiba-tiba Mohammad Natsir jatuh sakit dan segera dilarikan ke Rumah Sakit, maka ia tidak mengikuti rapat.

Walaupun demikian Mohammad Natsir masih sempat menyerahkan pesan kepada Baswedan untuk disampaikan kepada seluruh lapisan rakyat untuk menghidupkan semangat perjuangan. Mohammad Natsir juga memberi intruksi khusus bagaimana melancarkan usaha untuk menimbulkan kerusakan kepada pihak Belanda. Pesan-pesan tersebut diperbanyak dan disebarluaskan keseluruh pelosok di Jawa dan Sumatera.⁹

Setelah Belanda berhasil menduduki ibukota RI yaitu Yogyakarta, maka pada tanggal 22 Desember 1948 pukul 09.00 pagi tokoh nasional ditawan, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, A.G.Pringgodogdo, Asaat, Suriadarma dan H.A.Salim di bawa ke luar Jawa yaitu Berastagi, Sumatera. Istana dijadikan sebagai tempat untuk menawan para pemimpin seperti Leimena, Mohammad Natsir, Ki Hajar Dewantara, Djuanda, Ratulangi, Sewaka, Ratuhary, Sunarto dan Mohamad Roem. Setelah Mohammad Natsir ditawan di Istana Yogyakarta kemudian dipindahkan ke Jakarta. Ia ditahan bersama dengan Adam Malik dalam Hotel Polisi kwitang Jakarta.¹⁰

Sedangkan tiga orang pemimpin besar Indonesia, Soekarno, H.Agus Salim dan Sutan Syahrir yang ditawan Berastagi Sumatera Utara dipindahkan

⁹ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 186.

¹⁰ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 85.

ke Prapat.¹¹ Dan tokoh lainnya seperti Mohammad Hatta, A.G. Pringgodigdo, Asaat, Suriadarmo, Mohamad Roem dipindahkan ke Bangka. Dengan tertangkapnya Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta serta para Menteri, maka pemerintahan Indonesia dalam keadaan kosong artinya bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Sebelum Presiden dan wakil Presiden ditangkap, pada tanggal 19 Desember 1948 keduanya masih sempat mengadakan sidang kabinet yang memutuskan untuk memindahkan kekuasaan kepada Mr.Syafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran yang pada saat itu sedang berada di Sumatera. Adapun isi dari keputusan sidang yang akan disampaikan kepada Mr.Syafruddin Prawiranegara adalah sebagai berikut :¹²

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi Belanda telah memulai serangan atas Ibukota Yogyakarta, jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya, kami menguasakan kepada Mr.Syafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan Darurat RI di Sumatera.

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden

Wakil Presiden

Soekarno

Mohammad Hatta.

Maka dengan adanya mandat ini Mr.Syafruddin Prawiranegara dapat membentuk PDRI, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan RI.

¹¹ A.H.Nasution, *op.cit*, hlm. 212,

¹² H. Endang saifuddin Anshari dan M.Amin Rais, *Pak Natsir 80 tahun: pandangan dan Penilaian Generasi Muda*, Media Dakwah, Jakarta, 1988, hlm. 3.

Permusuhan yang terjadi antara Belanda dan Indonesia, pada akhirnya dilakukan melalui jalan diplomasi yaitu berupa perundingan. Perundingan resmi antara Indonesia dan Belanda ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 yang diwakili oleh Mohamad Roem dari Indonesia dan Dr. Van Roijen wakil dari Belanda. Dalam perundingan ini Mohammad Natsir yang menjabat sebagai Menteri Penerangan pada awalnya turut dalam delegasi Indonesia, tetapi ia hanya bertindak sebagai penasehat dari Mohamad Roem.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 perjanjian antara Belanda dan Indonesia tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dikenal dengan nama Roem-Royen Statement yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :¹³

1. Gencatan Senjata
2. Pengembalian Pemimpin-pemimpin dan Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
3. Akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar antara RI, Belanda dan BFO (*Bejeen Komst Var Federal Overleg*)

Perjanjian yang telah disetujui oleh Indonesia dan Belanda ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara. Oleh karena itu Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan utusan ke Sumatera Utara. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1948 Mohammad Natsir beserta lainnya berangkat menjemput Syafruddin Prawiranegara ke Bukit Tinggi.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

Sebagai ketua rombongan dan Menteri Penerangan Mohammad Natsir mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan amanat Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara. Akhirnya dengan pertemuan yang cukup lama antara Mohammad Natsir, D.J.Leimena, Dr.Halim dan Agus Yamin dengan tokoh-tokoh PDRI mencapai kesepakatan, bahwa ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara menyetujui perundingan tersebut dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno sehingga tanggung jawab perjuangan selanjutnya diberikan ke tangan Presiden Soekarno.

Sekembalinya dari tugasnya menjemput pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir mendapat perintah dari Mohammad Hatta untuk menyelesaikan masalah Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dalam hal ini ia berusaha untuk menghubungi Kartosuwiryo yang pada saat itu berada di Jawa Barat melalui sepucuk surat pada tanggal 5 Agustus 1949 untuk mencegah timbulnya keadaan berpatah arang.¹⁴ Namun tindakan tersebut sudah terlambat karena pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo secara resmi telah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Adapun isi dari proklamasi tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵

“Dengan nama Allah yang maha pengasih bagi Maha penyayang, kami umat Islam dari rakyat Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Hukum yang berlangsung dalam Negara Islam Indonesia ini adalah hukum Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar,Allahu Akbar.”

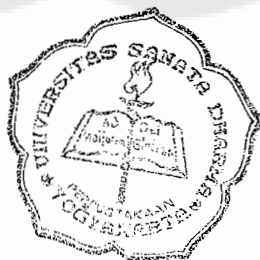
¹⁴ B.J.Boland, *Pergumulan Islam Indonesia*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hlm. 62.

¹⁵ *Ibid.*

Akhirnya pada bulan September dibentuk sebuah panitia pemerintah di bawah pimpinan Mohammad Natsir untuk mencari penyelesaian masalah Darul Islam. Namun sangat sedikit yang dapat diperbuat oleh panitia ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendukung Darul Islam yang memberontak kepada pemerintah agar bersedia mengakui Darul Islam ini di Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dalam perundingan ini Mohammad Natsir hanya bertugas sebagai pengawas saja. Dalam perundingan ini yang menjadi wakil dari Indonesia adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Roem. Kedua tokoh ini berusaha membujuk Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Maka setelah perundingan ini berakhir, Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia kecuali Irian Barat (Irian Jaya).

Hasil dari perundingan KMB ini sangat ditentang Mohammad Natsir, karena kedaulatan yang diserahkan Belanda tidak seluruhnya diberikan kepada Indonesia. Ia juga memberikan pernyataan kepada Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri yaitu apabila hasil perundingan ini diterima delegasi maka ia akan mengundurkan diri dari pemerintahan.



C. Peranan Mohammad Natsir Sebagai Ketua Partai Masyumi tahun 1949-1958.

Masyumi adalah wahana perjuangan politik Islam yang berdiri pada akhir tahun 1943 sejak zaman Jepang. Masyumi pada tahun ini hanya terbuka bagi perserikatan-perserikatan yang telah diberi status hukum oleh pemerintah militer dan mempunyai tujuan politis yang menguntungkan pihak Jepang, yaitu untuk mempersatukan semua perserikatan atau organisasi yang diakui oleh Jepang. Namun Masyumi pada masa Jepang ini tidak bertahan lama karena Jepang menyerah kepada sekutu dan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengubah keberadaan Masyumi, karena pada tanggal 17 November 1945 Masyumi dibentuk kembali sebagai wahana perjuangan umat Islam melalui kongres nasional umat Islam di Yogyakarta. Dalam kongres ini, tercatat sebagai ketua panitia ialah Mohammad Natsir dengan anggota-anggotanya seperti, Soekiman Wirjosendjojo, Abikusno Tjokrosujoso, A.Wahid Hasjim wali Al-Fatah, Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII, dan Gaffar Ismail.¹⁶

Partai Masyumi ini mempunyai tujuan yaitu menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.¹⁷ Tujuan ini mengarah pada keinginan Masyumi untuk

¹⁶ A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik Di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 31.

¹⁷ M.Rusli Karim, dkk, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 68.

menciptakan suatu Indonesia yang bercorak Islam dengan memberikan kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologi masing-masing. Tujuan ini termuat dalam anggaran dasar Masyumi tentang gambaran suatu negara yang berdasarkan Islam.¹⁸

“ Kita menuju kepada baldatul thayyibatun Wa Rabbun ghafur, Negara yang berkebajikan dan diliputi ampunan Illahi, di mana Negara melakukan kekuasaannya atas musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih, di mana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, tasamuh ‘lapang dada’, keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam, terlaksana sepenuhnya, di mana kaum muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur’an dan As-sunnah, di mana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk menganut dan mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya, di mana seluruh penduduk dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman, terjamin baginya hak-hak asasi manusia, yang termasuk didalamnya, keadilan dilapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, di mana kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan susila.”

Dari anggaran dasar tentang suatu negara yang berdasarkan Islam, maka selanjutnya disusun usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun usaha tersebut termuat dalam pasal III anggaran dasar yang isinya sebagai berikut :¹⁹

¹⁸ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 44.

¹⁹ M. Rusli Karim, *op.cit*, hlm. 69.

1. Menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik
2. Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang dan mempertahankan agama dan kedaulatan negara.
3. Melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, perikemanusiaan, sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam.
4. Bekerja sama dengan golongan lain dalam lapangan perjuangan untuk menegakkan kedaulatan negara.

Dengan tafsiran anggaran dasar dan usahanya ini, Masyumi ingin menegakkan kedaulatan negara melalui tangan beberapa pemimpin Masyumi seperti Mohammad Natsir. Keberadaan Mohammad Natsir dalam Masyumi ini pada akhirnya nanti akan membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi dan sosial.²⁰

Selama menjabat sebagai ketua partai Masyumi Mohammad Natsir telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umat Islam dan partai politik di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui apa yang disebut sebagai Mosi Integral M. Natsir. Mosi ini melahirkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengganti pemerintah Republik Indonesia Sementara pada tahun 1950.

Sebagai ketua partai Masyumi Mohammad Natsir mempunyai tujuan dan perjuangan untuk melaksanakan ajaran dan hukum serta kehidupan orang

²⁰ Luth Thohir, *op.cit*, hlm. 41.

seorang, masyarakat dan negara.²¹ Tujuan dan perjuangannya ini dimasukkan kedalam anggaran dasar Masyumi tentang gambaran suatu bangsa yang berdasarkan Islam artinya bahwa Masyumi ingin mewujudkan negara RI yang "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" itu dengan tidak meninggalkan kelompok minoritas selain Islam di negara RI.²²

Dalam perkembangannya program-program yang dijalankan oleh partai Masyumi tidak berjalan dengan mulus, hal ini disebabkan pada bulan Juli 1947, salah satu organisasi pendukungnya yaitu Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) meninggalkan Masyumi untuk kembali menjadi politik independen. Kemudian pada tahun 1952 Nadatul Ulama (NU) organisasi masyarakat terbesar pendukung Masyumi juga meninggalkan Masyumi. Kedua partai ini keluar tidak jelas sebabnya, tetapi salah satu penyebab keluarnya Nadatul Ulama karena alasan perebutan jabatan Menteri Agama. Dengan keluarnya kedua partai ini sangat merugikan umat Islam karena keduanya adalah motor penggerak berjalannya program partai Masyumi.

Perpisahan yang terjadi dalam Masyumi ini membuat posisi Mohammad Natsir sebagai ketua partai Masyumi seperti buah simalakama, sangat membingungkan. Akan tetapi pada waktu yang sama dalam perannya sebagai ketua umum partai Masyumi diharapkan agar Mohammad Natsir menemukan suatu cara untuk dapat hidup terus menerus di kalangan unsur yang saling berbeda di dalam partai dan kadang kala cara ini secara mencolok kurang progresif dibandingkan pendapat-pendapatnya sendiri.

²¹ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 167.

²² Luth Tohir, *op.cit*, hlm. 45.

Telah disinggung di atas bahwa Mohammad Natsir telah memainkan perannya sebagai juru pemersatu yang dikenal dengan Mosi Integral M.Natsir. Peran ini membawa Mohammad Natsir berulang kali mengadakan pendekatan terhadap berbagai partai dan kekuatan golongan saat itu, di mana ia harus berbicara dengan kalangan yang dianggap paling kiri seperti Soekiman dari Partai Komunis Indonesia (PKI), sampai yang paling kanan B.Sahepaty Eangle, wakil dari *Byzonder Federal Overleg* (BFO) yang sering disebut sebagai boneka Belanda.²³

Meskipun Mosi Integral Mohammad Natsir ini berhasil, tetapi sebagai tokoh puncak Masyumi, Mohammad Natsir memiliki tekad berjuang untuk menjadikan Islam sebagai penyuluh hidup bernegara atau sebagai dasar negara. Hal ini terbukti dengan diajukannya pernyataan mengenai Islam sebagai dasar negara melalui lembaga Konstituante pada tahun 1957. Menurut Mohammad Natsir fungsi dari lembaga konstituante adalah suatu lembaga penyusun konstitusi yang dianggap pengganti UUDS yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjelajahi, membandingkan pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 20 Mei 1957 sampai 17 Juni 1959, permasalahan tentang dasar negara RI mulai dibicarakan dalam sidang pleno. Dalam sidang ini Mohammad Natsir mulai mengemukakan pendapatnya pada tanggal 12 November 1957 mengenai Islam sebagai dasar hidup bernegara.

²³ *Ibid*, hlm. 48.

Pada kesempatan itu Mohammad Natsir menyampaikan pidatonya mengenai Islam sebagai dasar negara, ia mengatakan bahwa hanya ada dua alternatif untuk meletakkan dasar negara dalam sikap dasarnya, yaitu faham sekularisme (la Diniah) atau paham agama.²⁴ Menurut Mohammad Natsir sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung faham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniawian.²⁵ Di dalam kehidupan kaum sekularis tidak ada hal yang tertuju keluar batas-batas duniawi tidak kekehidupan di alam baka dan tidak kepada Tuhan.

Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu ilahi sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan tetapi menganggap masyarakat, sejarah sebagai sumber kepercayaan dan nilai moral dan tujuan ilahi untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu Mohammad Natsir menyarankan agar negara mengambil sikap yang tegas karena sekularisme tidak sanggup memberikan bimbingan yang kuat dan tegas terhadap negara dan masyarakat. Mohammad Natsir juga menegaskan bahwa agama yang telah menjadi anutan rakyat Indonesia sejak dulu dapat memberikan pengarahan yang jelas dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam sidang ini pula Mohammad Natsir juga mengajukan argumen sebagai berikut.²⁶

Islam mempunyai suatu kaidah, yaitu mengenai soal ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan: "semua terlarang, kecuali yang diperintahkan". Dan apa

²⁴ M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Segi Arsy, Bandung, 2004, hlm. 31.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Study Sosial Legal Atas Konstituante 1956-1959*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 71

yang mengenai hidup keduniaan: "semua boleh, kecuali yang terlarang". Menurut istilah jurisprudensi Islam, kaidah ini dinamakan *Al-baraatul Ashliyah*.

Islam memberi dasar-dasar pokok untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi, lain dari pada itu ia menerangkan batas-batas (*hudud*) yang boleh dan tidak harus diindahkan oleh manusia untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia sendiri, baik pribadi maupun masyarakat.

Dalam perdebatan mengenai dasar negara ini Mohammad Natsir menolak Pancasila dijadikan dasar negara karena menurutnya Pancasila dianggap sekularisme (*Ia Diniyah*) yang tidak mengakui wahyu Ilahi sebagai sumber.

Meskipun sebelumnya ia sangat mendukung bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang dapat menjadi pengayom bangsa, ini terlihat dari ceramah yang disampaikannya di depan *the Pakistan Institute of World Affairs*, Karaci yang isinya sebagai berikut :²⁷

"Pakistan adalah sebuah negeri miskin. Demikian pula halnya Indonesia. Walaupun kami mengakui Islam sebagai agama rakyat Indonesia, namun kami tidak menyatakan hal ini secara tegas dalam konstitusi kami. Kami pun tidak menyisihkan agama dari kehidupan nasional kami. Indonesia telah menyatakan keyakinannya dalam pancasila yang telah kami ambil sebagai dasar spritual, moral dan etis bangsa dan negara. Kami punya anda dan milik kami sama. Hanya dinyatakan secara berlainan."

Ia juga mengatakan bahwa perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an, tapi tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik dengan semua ajaran-ajaran Islam, artinya bahwa Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam tetapi Pancasila itu

²⁷ H. Endang saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka:Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1983, hlm. 64.

bukanlah berarti Islam. Ia juga beranggapan Pancasila adalah perumusan lima cita kebajikan yang harus dipegang kukuh oleh semua rakyat Indonesia.

Pada bagian lain ia juga menyatakan bahwa perumusan Pancasila tidak berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an, ringkasnya :²⁸

1. Bagaimana mungkin Qur'an yang memancarkan tauhid, akan terdapat *apriori* (melihat keadaan yang sebenarnya) bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana mungkin Qur'an yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan 'Adalah Ijtima'iyah bisa *apriori* (melihat keadaan yang sebenarnya) bertentangan dengan Keadilan Sosial ?
3. Bagaimana mungkin Qur'an yang justru memberantas system feodal dan pemerintahan *istabdad* sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintah, dapat *apriori* (melihat keadaan yang sebenarnya) bertentangan dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?
4. Bagaimana mungkin Qur'an yang menegakan istilah *Ishlahu baina'n-Nas* sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dapat *apriori* (melihat keadaan yang sebenarnya) bertentangan dengan apa yang disebut Prikemanusiaan.
5. Bagaimana mungkin Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar sehat bagi kebangsaan, *apriori* (melihat keadaan yang sebenarnya) dapat dikatakan bertentangan dengan Kebangsaan?

²⁸ *Ibid*, hlm. 65

Namun pandangan Mohammad Natsir pada akhirnya berubah kurang menyetujui Pancasila. Hal ini disebabkan oleh pidato yang disampaikan Presiden Soekarno dalam kuliah umum di Makasar pada tanggal 5-6 Mei 1954 mengenai Pancasila, pada sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun isi dari materi kuliah yang disampaikan Presiden Soekarno kepada para nasionalis Islam, yaitu :²⁹

“Bangsa Indonesia tokh masih stadia agraria, agrariscbvolk. Buka lagi kitabnya Huxender tadi, *Economisch toetstand van den inlandsch bevolking*, buka. Engkau akan melihat dia punya angka yang menunjukkan paling sedikit 72% Bangsa Indonesia hidup dari pada pertanian. Pertanian yang seperti dulu, bukan pertanian modern, tidak. Dan satu bangsa yang masih dalam stadia agraria, tidak boleh tidak mesti mistik atau religieus..

Selanjutnya Soekarno berkata pula dalam pertemuan Gerakan Pembela Pancasila di Istana negara pada tanggal 17 Juni mengenai sila pertama Pancasila, yaitu:³⁰

Ketuhanan, (Ketuhanan di sini saya pakai di dalam arti *religieusiteit*), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku lihat ialah *religieusiteit*. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup di atas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup di atas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan *religieusiteit*, atau kepercayaan kepada suatu hal yang gaib yang menguasai hidup

²⁹ *Ibid*, hlm. 67.

³⁰ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, *op.cit*, hlm. 37.

kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup di dalam taraf agraria.

Pernyataan yang disampaikan Presiden Soekarno ini menjelaskan bahwa Tuhan atau *religieusiteit* selalu berada dalam kehidupan manusia dan akan terus menguasai hidup manusia, khususnya bagi rakyat Indonesia yang masih hidup dalam taraf agraris. Selain itu pernyataan Soekarno juga menjelaskan bahwa seseorang yang masih dalam kehidupan agraris memerlukan Tuhan, karena mereka masih menggantungkan hidupnya kepada Tuhan tetapi bila sudah menjadi industrialis Tuhan tidak diperlukan lagi, karena mereka sudah hidup dalam kepastian dan kemapanan.

Pernyataan ini sangat ditolak oleh Mohammad Natsir karena Pancasila kedudukannya tidak lebih tinggi dari wahyu Tuhan sehingga keberadaan dasar negara harus berdasarkan wahyu Tuhan yaitu agama Islam. Ia berpandangan bahwa Islam mencakup semua unsur baik dalam Pancasila dan paham progresif sosial-ekonomi sebagai dasar negara. Islam juga merupakan ideologi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan serta hubungan antar manusia sendiri.³¹

Oleh karena itu ia mengajukan Islam sebagai dasar negara dalam sidang Konstituante tahun 1957. Namun hal ini tidak berhasil karena pada tanggal 2 Juni 1959 perdebatan tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante telah berakhir dan tanpa menghasilkan keputusan apa pun. Keadaan ini membuat terbelengkalainya pembuatan suatu UUD permanen dan terjadinya kemacetan Konstitusional.

³¹ Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, hlm, 106-107.

Melihat keadaan itu, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan untuk kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Majelis Konstituante. Meskipun demikian Pancasila masih tetap menjadi dasar negara Indonesia sampai sekarang.

D. Peranan Mohammad Natsir Sebagai Perdana Menteri tahun 1950-1951.

Mosi Integral yang disampaikan Mohammad Natsir kepada Dewan Perwakilan RIS pada tanggal 3 April 1950 membawanya menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Natsir. Adapun susunan kabinet Natsir adalah sebagai berikut :³²

Perdana Menteri	: Mohammad Natsir (Masyumi)
Wakil Perdana Menteri	: Sultan Hamengkubono (non partai)
Menteri Luar Negeri	: Mr.M.Roem (Masyumi)
Menteri Dalam Negeri	: Mr.Assaat (non partai)
Menteri Pertahanan	: Dr.Abdul Halim (non Partai)
Menteri Kehakiman	: Mr.Wongsonegoro (PIR)
Menteri Penerangan	: Pellaupessy (fraksi Demokrasi)
Menteri Keuangan	: Mr.Syafruddin Prawiranegara (Masyumi)
Menteri Pertanian	: Mr. Tandino Manu (PSI)
Menteri Perdagangan dan Industri	: Dr.Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
Menteri Komunikasi	: Ir Djuanda (non partai)

³² H. Endang Saifuddin Anshari dan Amin Rais, *op.cit*, hlm. 69.

Menteri Pekerjaan Umum	: Prof.H.Johannes (PIR)
Menteri Perburuhan	: Suroso (Parindra)
Menteri Sosial	: Haryadi (Katolik)
Menteri Pendidikan	: Dr.Badhar Djohan (non partai)
Menteri Agama	: KH.Wachid Hasjim (Masyumi)
Menteri Kesehatan	: Johanes Leimena (Parkindo)
Menteri Negara	: Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Pada kabinet ini, Mohammad Natsir menerapkan program kerjanya adalah sebagai berikut:³³

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum, untuk konstituante dalam waktu singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat (Psl 146 UUD)
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentaraman.
4. Memperkembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat, melaksanakan keragaman antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usahanya yang meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemilihan bebas anggota tentara dan gerilya kedalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat.

³³ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 107.

Kabinet Natsir yang terbentuk ini mendapat kecaman dari kalangan Masyumi, karena berdasarkan keputusan kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai menjadi Menteri, ini juga berlaku bagi Mohammad Natsir. Kecaman terhadap Natsir ini keluar dari mulut Sukiman yang mengatakan bahwa kabinet Natsir merupakan Zaken Kabinet dan bukan kabinet dari wakil-wakil partai sebagai yang diperintahkan presiden semula dan yang sesuai dengan keinginan rakyat.³⁴

Pada awal masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Mohammad Natsir berusaha untuk menciptakan suasana baru melalui pendekatan-pendekatan dengan bekas-bekas para pejuang kemerdekaan yang menghilang dari kehidupan masyarakat dan yang berada di daerah-daerah terpencil. Ia memberikan semangat kepada mereka untuk terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan agar tetap maju dan berkembang. Untuk dapat memberikan semangat kepada mereka yang jauh dari kehidupan negara, maka Mohammad Natsir menyiarkannya melalui radio siaran nasional dan segala mas media yang ada pada saat itu. Ia menghimbau kepada mereka untuk meninggalkan cara-cara gerilya yang mereka pergunakan dan mengabaikan dirinya untuk pembangunan negara baru Indonesia. (lihat lampiran 2, hlm.87). Dengan berbuat demikian mereka akan mempunyai banyak kesempatan memperjuangkan cita-citanya dengan cara yang tertib.³⁵

Walaupun agak sulit, tetapi seruan yang disampaikan Mohammad Natsir tersebar ke seluruh daerah dan mendapat tanggapan yang baik, seperti

³⁴ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 205.

³⁵ M. Natsir, *Capita Selektta*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 8-10.

Jawa Barat tepatnya di Bumi Ayu dan Indra Mayu. Kesulitan dalam penyampaian berita tersebut disebabkan oleh terjadinya insiden berupa bentrokan pasukan yang turun dari pegunungan di bawah pimpinan Kartosuwiryo dan pasukan TNI. Untuk mengatasi masalah ini Mohammad Natsir kembali menghubungi Kartosuwiryo dengan mengutus wali Alfata seorang teman lama Kartosuwiryo untuk menemuinya. Dan pada tanggal 20 Oktober 1950 Kartosuwiryo menghubungi Soekarno melalui sepucuk surat rahasia dengan tembusan kepada Perdana Menteri Natsir untuk menyatakan kegembiraannya bahwa Republik Indonesia telah mengambil keputusan untuk menjadi anggota PBB.³⁶

Peranan Mohammad Natsir tidak hanya sampai di situ, ia juga mempunyai peran dalam mengatasi masalah Aceh yang pada waktu itu menginginkan otonomi. Aceh merasa terpukul ketika daerahnya digabungkan kedalam propinsi Sumatera Utara yang pusatnya di Medan. Aceh merupakan propinsi dan wilayah yang tidak pernah disentuh atau dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu Aceh menginginkan otonomi.

Kemudian Mohammad Natsir mengutus Menteri keuangan yaitu Syafruddin Prawiranegara dan menteri dalam negeri yaitu Mr. Assaat. Namun tidak mendapatkan penyelesaian. Keadaan ini membuat wakil presiden Mohammad Hatta turun tangan, maka pada tanggal 27 November 1950 Mohammad Hatta berangkat ke Aceh, tetapi usaha yang dilakukan Mohammad Hatta juga tidak berhasil.

³⁶ B.J. Boland, *op.cit*, hlm. 63-64.

Kemudian pada tanggal 23 Januari 1951 Mohammad Natsir bersama rombongan berangkat ke Aceh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedatangan Mohammad Natsir disambut oleh istri dari Tengku Daud Beureneh secara kekeluargaan. Pada kesempatan ini pula Mohammad Natsir bertemu dengan pemuka-pemuka masyarakat Aceh dan mengadakan pertemuan untuk mengatasi masalah otonomi.

Dalam pertemuan ini Mohammad Natsir menjelaskan semua yang terjadi di Jakarta dan berusaha untuk meredakan amarah tokoh masyarakat Aceh. Namun pertemuan ini juga tidak membawa hasil. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini, maka Mohammad Natsir mengambil suatu keputusan untuk mengadakan pidato radio sebagai akhir dalam menyelesaikan masalah ini. Isi dari pidato ini adalah menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi sebenarnya kepada masyarakat Aceh dan menganjurkan supaya bersama-sama menghadapi persoalan ini dengan hati yang lapang, sehingga apa yang dicita-citakan tercapai sesuai rencana. (lihat lampiran 3, hlm. 89.). Dan pada kesempatan ini pula Mohammad Natsir menjanjikan kepada Aceh bahwa akan membentuk UU tentang otonomi sehingga daerah-daerah secara menyeluruh memperoleh otonomi.

Selain itu Mohammad Natsir juga mulai membangun perekonomian Indonesia. Dalam hal ini ia lebih menekankan pada pelaksanaan yang mendesak yaitu reorganisasi dan rasionalisasi militer dan birokrasi, stabilitas dibidang keuangan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam mewujudkan program ekonominya ini kabinet Natsir mendapat keuntungan karena

tersedianya harga-harga barang ekspor utama Indonesia, dana-dana yang terkumpul ini mengakibatkan perbaikan-perbaikan bagi kondisi ekonomi negara secara menyeluruh.

Kebijakan-kebijakan ekonomi Mohammad Natsir ini berasal dari Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri perdagangan dan Industri. Sumitro menginginkan perubahan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Langkah ini direalisasikan dalam program RUP (Rencana Urgensi perekonomian). RUP ini menekankan pengembangan industri yang bersifat darurat dan jangka pendek baik Indonesia kecil, Indonesia menengah, Industri besar maupun pengembangan laboratorium dan lembaga riset yang mendukung kegiatan industri.³⁷

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Mohammad Natsir ini mendapat kritikan dari lawan politiknya yaitu PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyosukarto. Kritikan ini disebabkan pihak Sidik lebih menekankan perlunya nasionalisasi industri-industri vital dan campur tangan pemerintah yang intensive terhadap perekonomian. Setelah meletakkan dasar perbaikan perekonomian negara secara menyeluruh, Kabinet Natsir mendapatkan serangan-serangan keras dari kelompok partai oposisi di Parlemen. Serangan ini dilakukan atas kebijakan Mohammad Natsir mengenai pembubaran Uni dan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Menurut mereka Mohammad Natsir terlalu lemah dalam melaksanakan pendekatan untuk membujuk Belanda agar menarik diri dari Irian Barat. Pendekatan yang

³⁷ Sumitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, PT. Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 106-111.

lemah ini sengaja dilakukan Mohammad Natsir dengan harapan akan mendapat bantuan dari internasional terutama Amerika Serikat. Dan ia juga berkeinginan agar Irian Jaya dapat dipersatukan dengan ibarat “bias menangkap ikan tanpa mengeruhkan airnya”.³⁸

Meskipun pada akhirnya Mohammad Natsir berhasil mengatasi oposisi di Parlemen mengenai masalah Irian Barat, namun kekecewaan terhadap kabinetnya semakin meningkat. Hal ini memuncak ketika Hadikusumo dari PNI mengemukakan mosi kepada parlemen yang isinya desakan agar PP(Peraturan Pemerintah) no.39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota-anggota perwakilan dicabut. Lembaga perwakilan daerah yang sudah terbentuk atas dasar PP no.39 hendaklah diganti dengan suatu UU baru yang lebih bersifat demokratis untuk memilih anggota lembaga perwakilan baru. PP no.39 ini memang menentukan pemilihan secara bertingkat.³⁹ Tindakan yang dilakukan Hadikusumo ini adalah untuk menghancurkan kedudukan Masyumi, karena dengan adanya PP.no 39 tentang pendirian Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan eksekutif daerah di Jawa dan Sumatera sangat menguntungkan bagi kedudukan Masyumi.

Mosi Handikusumo itu diterima oleh parlemen sehingga sangat melemahkan posisi kabinet Natsir. Mohammad Natsir menganggap masalah ini sangat sulit untuk diatasi karena sebelumnya parlemen menyetujui untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan daerah atas dasar PP no.39, tetapi kenapa harus dicabut. Oleh karena itu Mohammad Natsir menentang untuk

³⁸ G. Moedjanto.M.A, *Indonesia Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 83.

³⁹ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 210.

mengeluarkan votum tidak percaya terhadap kabinetnya kalau ini yang dikehendaki parlemen.⁴⁰

Masalah-masalah yang terjadi ini membuat para menteri mengundurkan diri dari kabinet pada tanggal 20 maret 1951. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan Mohammad Natsir harus berakhir. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951 Mohammad Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia yaitu sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP merupakan lembaga legistalif yang bertugas membantu Presiden dan wakil Presiden dalam menjalankan tugas negara. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP merubah namanya menjadi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan perwakilan Rakyat). Dalam keanggotaan ini Mohammad Natsir dipilih menjadi ketua panitia dalam pembentukan BP KNIP pada tanggal 25 November 1945. Namun keanggotaan ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 3 Januari 1946 Mohammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Syahrir dan pada tanggal 29 Januari 1948 dalam Kabinet Hatta. Selama menjabat sebagai Menteri Penerangan Mohammad Natsir selalu dilibatkan dalam berbagai perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini Mohammad Natsir hanya bertugas sebagai pengawas dan penasihat dari para delegasi dari Indonesia..

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 212.

BAB IV

HASIL PERJUANGAN MOHAMMAD NATSIR DALAM BIDANG POLITIK

Perjuangan Mohammad Natsir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena keinginannya membawa bangsa Indonesia kepada kedamaian. Untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Mohammad Natsir menghadapi tantangan yang tidak sedikit, tetapi dengan semangatnya yang kuat dan tenaga yang tersisa ia dapat membawa bangsa Indonesia kepada kedamaian.

Mohammad Natsir telah banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari usahanya membangun Kementerian Penerangan Republik Indonesia menjadi lebih terarah dengan beberapa program kerjanya. Hasil perjuangan Mohammad Natsir juga terlihat dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui idenya mengenai “Mosi Integral”. Mosi ini mengandung makna “ Jangan pernah bercerai berai, tetapi bersatulah”, artinya bahwa pertentangan yang terjadi antara pemerintah federal dengan pemerintah republik jangan sampai terjadi tetapi keduanya harus bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini disampaikan Mohammad Natsir kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Mohammad Natsir juga berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia ketika menjadi Perdana Menteri.

A. Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

Tiga kali Mohammad Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Syahrir dan selanjutnya Kabinet Hatta. Selama menjabat sebagai Menteri Penerangan Mohammad Natsir telah berhasil membentuk Kementerian Penerangan Republik Indonesia menjadi lebih terarah. Sebelumnya Kementerian Penerangan Republik Indonesia tidak mempunyai program dan tempat yang bagus, tetapi dibawah pimpinan Mohammad Natsir Kementerian Penerangan Republik Indonesia mempunyai rencana program kerja dan tempat yang strategis yaitu berpusat di Yogyakarta.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia di bawah pimpinan Mohammad Natsir ini mempunyai program kerja yang di kenal dengan Panca Sila Kementerian Penerangan yang isinya mengenai tugas kewajiban Kementerian Penerangan, yaitu :¹

1. Memberi penerangan kepada segenap lapisan rakyat Indonesia tentang politik yang dijalankan oleh pemerintah (kabinet) serta memberi penerangan tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2. Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideology, negara Pancasila, seperti termasuk dalam UUD.

¹ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 81.

3. Memperdalam kesadaran politik dan kecerdasan membanding (Crtischezin) dari rakyat sebagaimana yang harus ada pada tiap-tiap warga negara yang menjunjung tinggi dasar demokrasi.
4. Memelihara jiwa dan roh perjuangan rakyat untuk melaksanakan cita-cita negara
5. Memperkenalkan keluar negeri Negara Republik Indonesia serta cita-cita persatuan bangsa seluruh Indonesia.

Rancangan program ini dibuat Mohammad Natsir bersama Sekjen Kementerian Penerangan Ruslan Abdullgani dan staf di Yogyakarta. Kota ini merupakan pusat dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Rancangan program ini disusun dan dijadikan sebagai sendi pokok Kementerian Republik Indonesia selanjutnya.

B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 15 Agustus Presiden Soekarno membacakan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan DPR-RIS dan senat di Jakarta, ini berarti bahwa berakhirnya masa Kabinet Ris. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia diproklamasikan kembali menjadi Negara kesatuan yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta.²

Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan pada tanggal 19 Desember 1949 dan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), maka RI merupakan

² *ibid*, hlm. 94.

satu negara bagian di antara 15 negara yang lain, ke-15 negara RIS adalah Negara Dayak Besar, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur dan Negara Jawa Tengah.³

Kabinet RIS ini memiliki 13 kementerian dan tiga menteri negara. Perdana Menteri dari kabinet RIS adalah Mohammad Hatta. Dalam kabinet ini Mohammad Natsir ikut menjadi formatur kabinet, tetapi tidak duduk di dalamnya karena pada saat itu ia menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Partai Masyumi yang menentukan haluan politik partai. Pada masa kabinet RIS banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah. Salah satu pemberontakan tersebut yang terjadi di Makasar oleh Andi Azis pada tanggal 5 April 1950. Ia menawan pejabat Panglima teritorium Indonesia Timur, Let.Kol Ahmad Yunus Mokoginto beserta seluruh staf dan ia juga menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah Negara Indonesia Timur.

Selain itu masalah juga muncul di Ambon pada tanggal 24 April 1950 yaitu mantan Negara Indonesia Timur, Dr.C.H.R Soumokil memproklamkan Republik Maluku Selatan yang terlepas dari NIT dan RIS. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah RIS telah berusaha menyelesaikannya secara damai, namun tidak berhasil. Salah satu cara yang paling baik adalah menumpasnya dengan kekuatan senjata.

³ *ibid*, hlm. 95.

Sementara itu sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidak puasan itu diwujudkan dalam bentuk tuntutan dari beberapa negara bagian yang dibentuk Van Mook agar meleburkan diri kedalam RI dan menuntut adanya negara kesatuan kembali. Dua belas negara menuntut masuk ke dalam RI tetapi beberapa negara bagian yaitu NIT (Negara Indonesia Timur), NST (Negara Sumatera Timur) dan NSS (Negara Sumatera Selatan) tidak mau mengabungkan diri kedalamnya sehingga terjadi dua aliran yaitu kaum republik dan kaum federal.

Keadaan ini semakin mempersulit pemerintah. Oleh karena itu Mohammad Natsir, yang mengetahui gelagat yang tidak baik dan membahayakan persatuan nasional, mengeluarkan suatu mosi yang dikenal dengan "Mosi Integral" pada tanggal 3 April 1950 dalam sidang Dewan Perwakilan RIS. Mosi ini menghimbau semua negara bagian untuk melebur, tidak pandang Negara mana bahkan RI sendiri sehingga dapat mendirikan negara kesatuan.⁴

Mosi inilah yang pada akhirnya mengantarkan masing-masing negara bagian untuk bersatu kembali dalam negara kesatuan RI. Mosi Integral ini ditandatangani oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Kr.Sakiruman, K.Wendoyo, Mr.A.M.Tambunan. Ngadiman Harjosubroto, B.Sahetapy Engel, Dr.Cokronegoro, Moch.Tauchid, Amelz dan H.Suajuddin Abbas.⁵

Usul Mohammad Natsir ini diterima oleh Pemerintah. Kemudian pemerintah mengadakan perundingan dengan Mohammad Hatta, Presiden

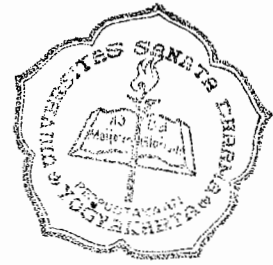
⁴ *Ibid*, hlm. 99. (lihat lampiran 4, hlm.93)

⁵ *Ibid*, hlm. 101.

Sukawati dari Negara Indonesia Timur dan Kepala Negara Tengku Mansur dari Negara Sumatera Timur di Jakarta pada tanggal 3-5 Mei 1950 dengan tujuan untuk mencari persetujuan tentang pembentukan negara kesatuan. Perundingan tersebut berhasil dilaksanakan dan menghasilkan piagam persetujuan antara kedua wakil pemerintahan pada tanggal 19 Mei 1950. Adapun isi dari piagam persetujuan RIS-RI, yaitu :⁵

- I. Persetujuan tentang kesediaan bersama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan dari RI Proklamasi 17 Agustus 1945.
- II. 1. UUD Negara Kesatuan diperpadat dengan mengubah konstitusi. Sementara RIS dengan memasukkan bagian-bagian assensial dari UUD-RI antara lain :
 - Pasal 27 tentang hak Warga negara
 - Pasal 29 tentang Dasar Negara dan kebebasan beragama
 - Pasal 33 tentang asas perekonomian
2. Dalam UUDS dimasukan pokok pikiran : "Hak milik adalah suatu fungsi sosial"
3. Perubahan ketentuan konstitusi RIS antara lain :
 - a. Senat dihapuskan
 - b. DPRS terdiri dari gabungan DPR-RIS dan BP-KNIP RI ditambah dengan anggota yang diangkat presiden atas usul pemerintah RIS dan RI.
 - c. DPR-RIS dan BP-KNIP merupakan majelis perubahan UUD

⁵ G. Moedjanto.M.A, *op.cit*, hlm. 72-73.



- d. Presiden ialah presiden Soekarno
- e. Dewan menteri harus bersifat parlementer.

4. DPA dihapuskan

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta sebagai wakil dari Pemerintah RIS dan Perdana Menteri Halim sebagai wakil dari Pemerintah RI yang merupakan negara bagian dari RIS

Setelah perundingan disetujui dan diterimanya Mosi Integral Mohammad Natsir, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno membacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI secara resmi dihadapan rapat gabungan DPR RIS dan senat. Dan bersamaan dengan itu pula Mr Assat sebagai Preasiden sementara RI dan Dr.A.Halim menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memproklamasikan secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Istana Jakarta. Dan dengan demikian bangsa Indonesia dapat memulihkan kesatuan sebagai bentuk Negara dan kesatuan bangsa Indonesia yang merupakan satu syarat bagi pembinaan bangsa dan negara selanjutnya.

C. Meningkatnya Perekonomian Ketika Menjadi Perdana Menteri

Perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik memperoleh hasil yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya. Hal ini dibuktikan ketika Mohammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri yang berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia. Walaupun jabatannya

sebagai Perdana Menteri hanya bertahan dalam jangka waktu 8 bulan tetapi telah memberikan sumbangan besar bagi bangsa Indonesia.

Sebagai Perdana Menteri Mohammad Natsir merancang program kerja bersama anggota-anggotanya. Program kerjanya menghasilkan 7 pasal dan yang menjadi penekanannya adalah pada perekonomian, kesehatan dan kecerdasan rakyat. Untuk dapat merealisasikan programnya ini ia melakukan reorganisasi dan rasionalisasi militer dan birokrasi, stabilitas dibidang keuangan dan peningkatan aktivitas ekonomi.⁶

Langkah ini membawa keuntungan yang besar bagi perbaikan kondisi ekonomi negara secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh tersedianya devisa luar negeri yang berasal dari harga-harga barang-barang ekspor utama Indonesia yang meningkat, sehingga dana-dana tersebut dapat mengendalikan inflasi. Usaha yang diterapkan Mohammad Natsir ini berhasil dan telah menciptakan sesuatu yang baru bagi perekonomian Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perubahan Bank Indonesia menjadi bank Devisa yang pertama, Pendirian Bank baru yaitu Bank Industri Negara (sekarang bernama Bank pembangunan Indonesia-Bapindo) yang berguna membiayai pembangunan yang bersifat jangka panjang. Selain itu berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang dapat membantu kegiatan-kegiatan baru di bidang perdagangan dan produksi dalam negeri dan dapat menjadi petunjuk-petunjuk

⁶ Anwar Harjono.S.H.dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta, 1966,hlm. 45.

dalam mendirikan perusahaan-perusahaan baru dalam memajukan Industri didaerah-daerah pertanian.⁷

Hasil perjuangan Mohammad Natsir ini merupakan langkah awal bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia dan untuk lebih memajukannya lagi dituntut adanya Natsir-Natsir muda yang mempunyai kejujuran, tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas negara.

Keahlian dan kecakapan Mohammad Natsir dalam menciptakan perdamaian politik ini, dilihat dari peranannya ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1946-1948 dan ia juga mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Hal ini membawanya menjabat sebagai ketua umum partai Masyumi. Partai Masyumi adalah partai terbesar di Indonesia. Selama menjabat sebagai ketua partai Masyumi Mohammad Natsir mempunyai andil dalam pembentukan Negara Kesatuan melalui idenya yaitu Mosi Integral yang disampaikan kepada Dewan Perserikatan RIS pada tanggal 3 April 1950. Selain itu, ia juga berusaha memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam lembaga konstituante. Keaktifannya dalam partai Masyumi ini sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang berani memasukkan Islam dalam Pancasila. Walaupun usahanya ini tidak berhasil, tetapi jasanya bagi umat Islam dan bangsa Indonesia tidak akan dilupakan.

Usaha Mohammad Natsir dalam mempertahankan negara Republik Indonesia yang baru merdeka berhasil. Usahnya ini merupakan

⁷ Yusuf Abdullah Puar, *op.cit*, hlm. 122.

hasil perjuangan yang diperolehnya dengan kerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu usaha yang telah diperolehnya ini akan dilestarikan dalam perkembangan Indonesia selanjutnya. Usaha Mohammad Natsir ini dapat dibuktikan dengan adanya Kementerian Penerangan yang tertata rapi, kembalinya negara kesatuan dan meningkatnya perekonomian Indonesia.



BAB V

PENUTUP

Mohammad Natsir adalah pahlawan Nasional bagi bangsa Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia adalah seorang politikus, pendidik dan ulama yang dengan tenaga dan pikirannya berusaha membentuk negara Indonesia ke taraf yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peranan Mohammad Natsir dalam pemerintahan. Dalam penelitian mengenai peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik 1945-1958 membahas 3 permasalahan, yaitu pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik di Indonesia, kedua apa saja peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958 dan ketiga apa hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia. Dari uraian bab II, III dan IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Mohammad Natsir mulai mengenal dan terlibat dalam bidang politik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, pendidikan dan watak dan kepribadian. Keadaan keluarga yang mendukung dan lingkungan yang tidak asing membuat Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik. Mohammad Natsir hidup dalam lingkungan keluarga yang mempunyai intelektual yang tinggi dan bekerja pada lembaga pemerintahan. Ia dituntut untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga sampai dewasa tetap mengakar di dalam dirinya.

Dalam kehidupan sehari-hari selain bersekolah, Mohammad Natsir diajarkan ilmu agama yaitu membaca kitab suci Al'quran (mengaji). Sebagai anak keturunan ulama, ia harus pandai mengaji dan menguasai semua ilmu agama. Selain sekolah, ia juga mengikuti beberapa organisasi yang ada pada saat itu. Organisasi inilah yang akhirnya membawa Mohammad Natsir aktif dalam bidang politik, yaitu JIB (*Jong Islamieten Bond*), di mana organisasi ini adalah organisasi Islam yang di dalamnya terdiri dari pemuda-pemudi Islam yang ingin memperjuangkan ajaran Islam.

Dalam organisasi ini Mohammad Natsir banyak mengikuti ceramah-ceramah tentang ajaran Islam, sehingga ketaatannya beragama semakin kuat dan ia pun akhirnya berhasil mengeluarkan sebuah buku tentang pengajaran sholat dalam bahasa Belanda. Setelah menyelesaikan sekolahnya Mohammad Natsir melibatkan diri dalam bidang politik yaitu PII (Partai Islam Indonesia) dan berhasil menjadi ketua PII tersebut pada tahun 1940.

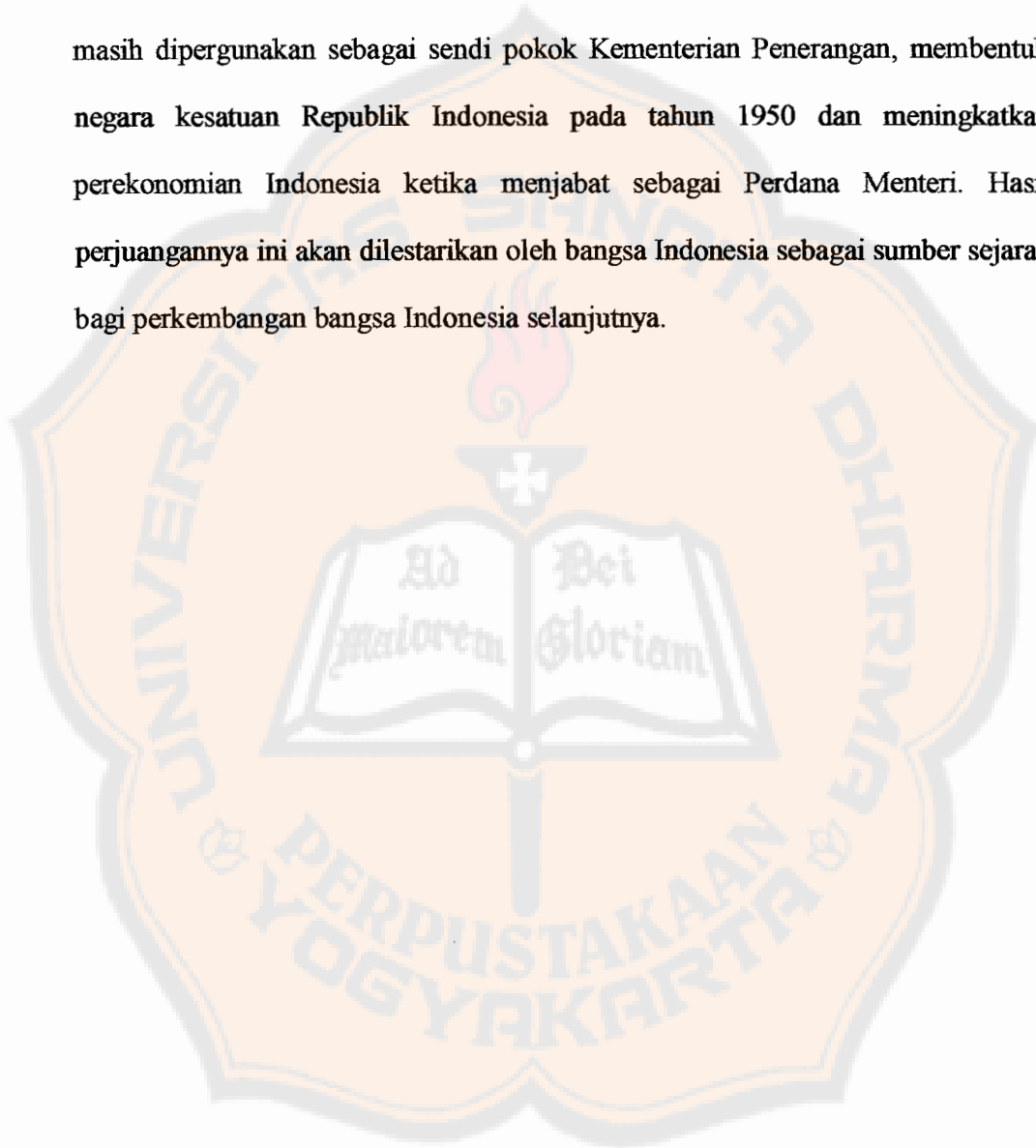
Keaktifannya dalam organisasi JIB (*Jong Islamieten Bond*) dan PII (Partai Islam Indonesia) ini membawanya terlibat kembali dalam kancah politik di Indonesia lewat lembaga negara. Keaktifannya ini dimulai dari keanggotaannya dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1945 sampai 1946. Dalam komite ini Mohammad Natsir mempunyai peranan dalam membantu Presiden dan wakil Presiden dalam menjalankan tugas negara. Keanggotaannya ini membuat Mohammad Natsir banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh politik, seperti Sutan Syahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Roem dan lain-lain. Karena kedekatannya dengan beberapa tokoh politik membawanya menjabat sebagai

Menteri Penerangan dalam Kabinet Syahrir tahun 1946 sampai 1947 dan kabinet Hatta tahun 1948 sampai 1949. Sebagai Menteri Penerangan 1946 sampai 1949, Mohammad Natsir mempunyai peranan dalam pelaksanaan perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia-Belanda. Dalam perundingan ini Mohammad Natsir berperan sebagai pengawas dan penasehat untuk wakil dari Indonesia.

Mohammad Natsir adalah tokoh nasional dan ulama yang terkemuka dalam lingkungan agama Islam. Ia mempunyai gagasan dan ide yang senantiasa mencerminkan sikap dasar yang tidak memisahkan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Gagasan dan ide yang cermelang ini sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk membangun perdamaian politik. Oleh karena itu Mohammad Natsir, diangkat menjadi ketua umum partai Masyumi pada periode 1949 sampai 1958. Selama menjabat sebagai ketua partai Masyumi banyak tenaga dan pikiran yang diberikan oleh Mohammad Natsir bagi umat Islam dan bangsa Indoneasia. Tenaga dan pikiran tersebut berupa idenya dalam membentuk negara kesatuan melalui Mosi Integral M. Natsir pada tahun 1950 dan usahanya dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam lembaga konstituante pada tahun 1957 sampai 1958. Perdebatan tentang dasar negara dalam lembaga konstituante tersebut pada dasarnya merupakan pertikaian antara para pendukung Pancasila dengan para penganut Islam yang memiliki perbedaan pandangan tentang dasar negara.

Hasil perjuangan dalam bidang politik yang dilakukan Mohammad Natsir merupakan usahanya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia

yang baru merdeka. Usahnya ini merupakan suatu modal untuk perkembangan bangsa Indonesia dikemudian hari. Keberhasilan Mohammad Natsir dalam bidang politik ini dapat ditunjukkan dengan berdirinya Kementerian Penerangan Republik Indonesia yang melahirkan lima program kerja yang sampai sekarang masih dipergunakan sebagai sendi pokok Kementerian Penerangan, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 dan meningkatkan perekonomian Indonesia ketika menjabat sebagai Perdana Menteri. Hasil perjuangannya ini akan dilestarikan oleh bangsa Indonesia sebagai sumber sejarah bagi perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Alamsiah Rais ST.,

1952 : *"10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang"*, Mutiara Bukit Tinggi
Padang Jakarta

Ajib Rosidi,

1990 : *"Mohammad Natsir Sebuah Biografi"*, Giri Mukti Pasaka. Jakarta

Anwar Harjono. S.H. dkk,

1996 : *"Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir"*. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1990 : *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka. Jakarta.

1986 : *"30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949"*, PT.Citra Lamtoro Agung
Persada, Jakarta.

Deliar Noer,

1965 : *"Pengantar Kepemimpinan Politik"*, Dwipa, Medan.

1987 : *"Partai Islam Di Pentas Nasional"*, PT.Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta.

Endang Anshari Saifuddin. H dan Amien Rais. M,

1988 : *"Pak Natsir 80 Tahun : Pandangan dan Penilaian Generasi Muda"*,
Media Dakwah, Jakarta.

1988 : *"Pak Natsir 80 tahun : Penghargaan dan Penghormatan Generasi
Muda"*, Media Dakwah, Jakarta

Endang Anshari Saifuddin. H,

1983 : *"Piagam Jakarta 22 Juni 1945"*, Pustaka:Perpustakaan Salman
Institut Teknologi, Bandung.

Gottschallk, Louis,

1985 : *"Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)"*, UI Press, Jakarta.

Kuntowijoyo.

1995 : *"Pengantar Ilmu Sejarah"*, Bentang Budaya, Yogyakarta

Luth Thahir,

2001 : *"Mohammad Natsir Dakwah dan Pemikirannya"*, Gema Insani Press, Jakarta.

Miriam Budiardjo,

2001 : *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Marbun. B.N,

"Kamus Politik", Sinar Harapan, Jakarta.

Moedjanto.G,

1989 : *"Indonesia Abad ke 20 jilid II"*, Kanisius. Yogyakarta.

Mohammad Natsir,

2004 : *"Islam sebagai Dasar Negara"*, Segi Arsy, Bandung.

1989 : *"Mohammad Natsir Politik Melalui Jahur Dakwah"*, dalam Tempo, Jakarta.

1973 : *"Capita Selecta"*, Bulan Bintang, Jakarta.

Nasution. A. B,

1955 : *"The Aspiration For Constitutional Government In Indonesia 1956-1959, trjm. Sylvia Tiwon : Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia, Studi-Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959"*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Nasution. A. H,

1986 : *"Tentara Nasional Indonesia Jilid III"*, Seruling Masa, Jakarta.

Osman Rabily,

1953, : *"Documenta Historica"*, Bulan Bintang, Jakarta.

Salim Peter dan Yenny Salim,

1991 : *"Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer"*, Modern English Press,
Jakarta.

Poerwadarminto.W.J.S,

1982, : *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta

Rusli Karim, M,

1983 : *"Perjalanan Partai Politik Di Indonesia:Sebuah Potret Pasang
Surut"*, CV. Rajawali, Jakarta.

Susanto Tirtoprodjo,

1963 : *"Sejarah Revolusi Nasional Indonesia"*, PT Pembangunan Gunung
Sahari 84, Jakarta.

Sumitro Djojohardikusumo,

1985 : *"Ekonomi Pembangunan"*, PT. Pembangunan Jakarta, Jakarta.

Slamet Mulyana,

1969 : *"Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia"*,
Balai Pustaka, Jakarta.

Syafii Maarif. A,

1988 : *"Islam dan Politik di Indonesia : Pada Masa Demokrasi Terpimpin
1959-1965"*, IAIN Sunan Kalijaga Press. Yogyakarta

Solihin Salam,

1990 : *"Wajah Nasional "*, Pusat Studi dan Penelitian Islam, Jakarta.

Yusuf Abdullah Puar,

1978 : *"Mohammad Natsir 70 tahun : Kenang-kenangan Kehidupan dan
Perjuangan"*, Pusaka antara Jakarta.

LAMPYRAN



Lampiran 1

Gambar Mohammad Natsir



Sumber :

Ajib Risidi, 1990, *Mohammad Natsir Sebuah Biografi*, Jakarta : PT. Giri Mukti Pasaka

Lampiran 2.

**Himbauan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri kepada rakyat
Indonesia**

“ Tingkatan perjuangan kita telah berganti. Tingkatan sekarang ini menghendaki cara perjuangan yang berlainan dari tingkatan peperangan gerilya menentang musuh seperti yang telah sudah itu. Tingkatan perjuangan sekarang tidak menghendaki lagi bahwa saudara-saudara meneruskan hidup memanggul senjata di pegunungan, terlepas dari ikatan keluarga dan masyarakat biasa.

Tenaga dan fikiran saudara diperlukan dilain lapangan.

Tenaga dan fikiran saudara diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih layak, baik dalam hubungan kekeluargaan dan rumah tangga sendiri ataupun dalam hubungan produksi dan pembangunan kesejahteraan umum.

Tenaga dan fikiran saudara untuk membangun negara denagan arti yang lebih luas, menyempurnakan Negara kita yang masih muda ini dalam pelbagai lapangan.

Sudah datang saatnya untuk menutup sejarah lama dan memulai lembaran baru. Sedah datang saatnya untuk memperbaiki persaudaraan kembali atas dasar saling mengerti, untuk hidup bersama dalam udara Negara merdeka yang sudah sama-sama kita tebus dengan pengorbanan yang demikian besarnya.

Mungkin ada hal-hal yang bagi saudara yang belum memberi kepuasan dalam negara kita yang muda ini.

Memang masih ada hal-hal yang terasa sebagai duri dalam daging. Akan tetapi hal demikian, sekali-kali tidak boleh dijadikan sebab untuk saudara menutup mata dari hasil-hasil yang sudah ada di tangan kita.

Memang masih banyak yang harus dipersembahkan. Kita baru saja mulai menyusun Negara dengan memakai hasil yang sudah ada sebagai modal atau pangkalan.

Walaupun bagaimana juga bagi saudara terbuka jalan untuk menyumbangkan fikiran dan tenaga saudara-saudara menurut cita-cita yang terkandung, dengan cara yang tertib-teratur memulai sakluran-saluran yang biasa, yang terbuka bagi tiap-tiap warga dan Negara Hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat ini.

Mari bersama-sama bersanding bahu, dengan tenaga tersusun menulis halaman baharu dalam riwayat Nusa dan Bangsa menuju kepada kebahagiaan lahir batin bagi segenap warga, serta diliputi kerelaan Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa.

Buat yang demikian jalan telah terbuka.

Pakailah kesempatan yang terbuka sekarang ini dengan cara-cara yang segera akan dimaklumkan.

Sumber :

Yusuf Abdullah Puar, 1978, *Mohammad Natsir 70 tahun : Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta : Pustaka Antara, hlm. 109-110.

Lampiran 3.

Pidato Mohammad Natsir dalam Penyelesaian Aceh

“Ingin saya hendak bertemu muka sendiri dengan saudara-saudara di Aceh dan Kutaraja khususnya sebagai mana yang telah sudah. Pertemuan wajah dengan wajah yang merupakan pertemuan dari hati ke hati sebagaimana yang telah sudah.

Saya datang pada saat ini sebagai seorang yang telah dipikulkan suatu tanggung jawab dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat dalam susunan yang pertama sekali dalam Negara Republik Indonesia ini. Pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah susunan Negara yang lebih memuaskan perasaan kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan hilangnya bentuk negara-negara bagian dan terciptanya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belumlah habis tugas dan kewajiban kita didalam menyusun diri kedalam, menyusun jalan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Soal negara-negara bagian telah selesai. Timbul soal yang lain yang tidak berupa soal federalisme atau unifarisme, akan tetapi soal pembahagian daerah-daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Soal baru ini berlainan namanya, akan tetapi sama sulitnya dan berkehendak kepada penyelesaian yang harus dilakkan berdasarkan kepada persiapan dan peninjauan yang sempurna pula.

Ada beberapa pedoman yang diwarisi oleh pemerintah sekarang dari program persetujuan RI dan RIS, pada waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdiri yaitu seluruh Indonesia di bagi dalam 10 propinsi.

Dalam hubungan inilah saudara-saudara harus melihat pembentukan propinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Suamtera Timur, Tapanuli dan Aceh.

Barang kali saudara-saudara bertanya : Bagaimanakah nasibnya pernyataa-pernyataan keinginan saudara-saudara khususnya di daerah Aceh ini ?

Pemerintah dalam menghadapi ini harus melihat soalnya dalam hubungannya yang menyeluruh. Pemerintah menyalurkan semuanya itu menurut perundang-undangan yang sewajarnya sebagaimana yang tersebut dalam UUD kita.

Hendaknya saudara-saudara melihat keinginan –keinginan saudara-saudara baik dari daerah Aceh, ataupun daerah yang lain yang sudah menyampaikan kepada pemerintah, bahwa semuanya itu merupakan bahan-bahan yang berharga untuk pekerjaan pemerintah dan parlemen seterusnya.

Saya berharap kepada saudara-saudara, supaya bersama-sama kita meletakkan soal pada tempatnya. Seluruhnya dengan pengertian, bahwa apabila keinginan saudara-saudara yang sudah dinyatakan, pada suatu saat belum terwujud, maka itu hendaknya janganlah menimbulkan perasaan kesal atau perasaan yang tidak enak atau perasaan kurang sabar. Semuanya itu adalah soal-soal yang sewajarnya timbul dalam negara yang berdasarkan demokrasi. Soal-

soal itu harus disalurkan menurut cara-cara yang sudah tertentu bagi negara kita ini.

Dalam hal ini hendaknya dapatlah saudara-saudara melihat langkah-langkah pemerintah dengan latar belakang sebagaimana yang saya kemukakan itu. Tindakan-tindakan pemerintah yang sekarang ini hendaknya janganlah saudara-saudara tafsirkan sebagai satu tanda pertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bila ada satu persoalan semacam ini, maka daerah, pemerintah pusat dan parlemen sama-sama berusaha mengatasinya. Bersama-sama kita mencari penyelesaian yang lebih memuaskan bagi kita semua.

Marilah kita menempatkan tiap-tiap soal pada ukuran yang sebenarnya dengan tabah hati, sebagai satu bangsa yang hendak menyusun dirinya ke dalam dengan rencana yang sebaik-baiknya.

Saya datang berkunjung ke Kutaraja, ke ibu kota daerah Aceh ini, untuk bertemu muka dengan para pemimpin yang bertanggung-jawab. Dengan pemimpin-pemimpin kepada siapa saudara-saudara saban hari memulangkan persoalan. Saya datang ke sini untuk mendudukan perkara itu pada tempatnya agar jangan ada perbedaan atau kekeliruan paham yang tidak kita inginkan dan harus kita singkirkan secepat mungkin.

Dalam hal ini, saya menyatakan penghargaan saya yang besar, atas saling pengertian yang telah dinyatakan oleh para pemimpin serta para alim ulama dari masyarakat Aceh yang bertanggung-jawab juga akan saling pengertian akan duduk perkara yang sebenarnya hingga hilang keliru-keliru sangka yang mungkin sampai sekarang ini ada. Akan tetapi dengan pertemuan-pertemuan yang baru

dilakukan ini, alhamdulillah telah hilang. Telah ditukar dengan rasa keseragaman.

Pertemuan yang baru percaya mempercayai itu melahirkan harapan akan dapat menyelesaikan soal ini dalam waktu singkat dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Sumber :

Salinan Rekaman Dokumentasi Departemen Penerangan Republik Indonesia yang terdapat dalam buku karangan Yusuf Abdullah Puar, 1978, *Mohammad Natsir 70 tahun : Kenang-kenangan dan Perjuangan*, Jakarta : Pustaka Antara.



Lampiran 4

Isi Mosi Integral Mohammad Natsir

Natsir dan kawan-kawannya menjauhkan diri dari pada pembicaraan soal unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi itu, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain.

Orang yang setuju dengan mosi itu tidak usah berarti, bahwa orang itu unitarisme. Orang federalis pun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal itu bukan soal teori struktur negara unitarisme atau feodalisme, akan tetapi soal menyelesaikan hasil perjuangan kita masa lampau yang tetap masih mengandung duri dalam daging.

Tiap-tiap orang yang meneliti jalan persengketaan Indonesia Belanda, tentu akan mengetahui bagaimana riwayat timbulnya NST (Negara Sumatera Timur) dan bagaimana fungsinya NST itu. Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau dan dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan perjuangan Republik Indonesia. Maka itulah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat. Bukan soal teori Unitarisme atau feodalisme.

Kejadian-kejadian bergejolak di NST bukan suatu hal yang bikin-bikin, akan tetapi adalah satu akibat yang tidak dapat dielakkan dan yang harus kita

selesaikan, karena Ia belum kita selesaikan dengan KMB (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil perundingan dengan Belanda dahulu.

Orang bisa berkata, bahwa semua mosi atau resolusi dari rakyat dan demonstrasi-demonstrasi yang telah berlaku di NST itu menurut Yuridisnya belum dapat dianggap sebagai manifestasi (pernyataan) dari kehendak rakyat. Tetapi coba, apakah akibatnya jikalau mosi ini ditolak lantaran di anggap proporsinya belum memadai. Itu akan berarti pancingan bagi rakyat Indonesia untuk meningkat protes dan demonstrasi.

Barang kali didalam meninjau mosi itu pemerintah merasa khawatir, kalau-kalau Ia akan mengakibatkan suatu bentrokan. Akan tetapi menolak dan mematikan mosi itu berarti memperhebat apa yang telah terjadi. Oleh karena itu letakkanlah titik berat dari misi itu pada apa yang disebut dalam keputusan, yaitu supaya pemerintah RIS menempuh jalan biasa dengan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan soal itu.

Jikalau pemerintah menganggap, bahwa bila pekerjaan itu dengan sekaligus dan serentak dijalankan akan menimbulkan bermacam-macam kekacauan, maka bagi pemerintah cukup terbuka jalan untuk mengadakan Undang-Undang Darurat untuk mengadakan masa peralihan. Dengan begitu RIS dapat bertindak tidak membiarkan rakyat di NST bergolak, dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan soalnya sendiri. Maka dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Darurat itu terbuka jalan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Baik kiranya kita lebih dahulu melihat mosi itu didalam hubungan yang lebih besar.

Tatkala konstitusi sementara ditandatangani dan diratifikasi (disetujui) umumnya orang, baik pemerintah atau parlemen menganggap, bahwa konstitusi itu dan struktur tatanegara dengan segala sifat-sifat yang baik dan cacat yang ada dalamnya, dapat dipakai sebagai dasar pemerintahan sementara sampai konstituante yang akan datang.

Akan tetapi rupanya, jalan sejarah menghendaki lain. Segera sesudah penyerahan kedaulatan, di daerah timbul pergolakan. Apa yang terpendam dan tertekan beberapa tahun yang lalu dalam hati rakyat, sekarang meluap dan meletus berupa demonstrasi dan resolusi untuk merombak segala apa yang dirasakan oleh rakyat yang restan-restan dari struktur kolonial di daerahnya. Terutama di daerah-daerah Republik Indonesia di pulau jawa, Sumatera dan Madura. Ini semua tidak mengherankan, akan tetapi adalah pembawaan riwayat perjuangan dan pertalian erat (Inhaerent) dengan cara penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda yang diakhiri dengan KMB.

Soal-soal yang harus dihadapi oleh negara kita yang muda ini sekaligus bertimbun-timbun dihadapan kita. Soal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sudah begitu lama menderita, soal pendemonstrasian pemerintahan, soal pembangunan ekonomi, soal keamanan, ketentaraan dan 1001 macam soal-soal lain lagi, semuanya sangat perlu sekali (Urgent) dan harus dipecahkan dengan segera. Kita bisa menyusun prioritasnya menurut pendapat kita masing-masing,

akan tetapi yang sudah terang ialah pemecahan soal yang satu bersangkutan paut dengan yang lain. Tidak dapat dipisah-pisah.

Usaha kemakmuran rakyat, penjaminan keamanan, tidak dapat berjalan selama belu ada ketentuan politik dengan negeri. Keteduhan politik (*Politieke rust*) tidak dapat diciptakan selama masih ada “duri-duri dalam daging” yang dirasakan oleh rakyat. Walaupun kedaulatan sudah ditangan kita, tetapi kita masih berhadapan dengan struktur-struktur serta alat-alat politik pengepungan yang diciptakan oleh Van Mook (jagoan Belanda) didaerahnya-daerah.

Dalam menghadapi pergolakan untuk melenyapkan duri duri dalam daging itu orang terbentur kepada konstitusi sementara, lebih lekas dari yang di sangka tadinya pikiran terombang-ambing antara :

- a. Kehendak akan tetap bersikap “konstitusional”
- b. Desakan untuk keluar dari konstitusi melalui lobang-lobang yang ada dalam konstitusi itu sendiri.

Inisiatif terlepas dari tangan pemerintah. Tidak ada konsepsi untuk menghadapi soal ini dalam jangka waktu yang tertentu. Semboyan yang ada hanyalah :” Terserah kepada kemauan rakyat.”

Rakyat bergolak dimana-mana. Hasilnya hujan resolusi dan mosi. Parlemen menerima dan tinggal mengalihkan semuanya itu pada pemerintah dengan tambahan argumentasi (alasan) yuridis dan lain-lain, dan kalau perlu dengan kutipan-kutipan (citaten) dari ensklopedi.

Dengan begitu pemerintah lambat laun terdesak kepada posisi yang defensif. Lalu pemerintah terpaksa menyelesaikan diri setapak demi setapak

dengan Undang-undang Darurat sebagai pengesahan (legalisasi). Dan setiap kali ada “pensesuaian dalam hal ini,” Parlemen dan pemerintah merasa “berbahagia” lantaran ada pensesuaian itu.

Dalam pada itu pintu kebahagiaan bagi rakyat belum kunjung kelihatan. Jalan pikiran tetap kabur dan samar. Dikaburkan oleh berkacaunya beberapa pengertian, seperti berkacaunya pengertian unitarisme dan federalisme dalam masyarakat, yang bukan lantaran federalisme atau unitarisme itu sendiri, sebagai bentuk struktur negara, akan tetapi lantaran kabur dan bercampur aduknya pengertian-pengertian itu dengan sentimen (perasaan) pertentangan, sebagai warisan dari persengketaan Indonesia Belanda.

Kekacauan pikiran melumpuhkan jalannya usaha pembangunan kemakmuran rakyat. Dengan begitu kita tidak terlepas dari lingkungan setan (viciouse cirkel) yang tidak tertentu dimana ujungnya.

Bagaimanakah mengartikan “terserah kepada kehendak rakyat itu ?” apakah itu berarti menyerahkan kepada rakyat untuk mengadu tenaga mereka didaerah-daerah ? untuk memperjuangkan kehendak mereka di tempat masing-masing dengan segala akibat-akibatnya dan eksese-eksesnya. Habis itu, lantas kita mengkonstantir (menetapkan) dan melegalisir (meresmikan) hasil dari pergolakan itu?.

Sekali lagi ditanyakan sampai berapa langkah kesediaan hanyut seperti itu ? Apakah sampai kita terbentur kepada satu batu karang nanti ?

Tidak, bukan begitu semestinya ! tetapi dengan sikap macam sekarang, dikuatirkan, pemerintah lambat laun akan hanyut kejurusan itu. Pemerintah yang

timbul dari rakyat dan untuk rakyat atau yang terdiri dari pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan sendiri, tentu sudah tahu benar dan sudah dapat merasakan, apa yang hidup dalam keinginan rakyat itu. Berdasar kepada pengetahuannya sewajarnya pemerintah melapor dan menyusun langkah-langkahnya dengan program yang tertentu dan teratur dalam jangka yang agak panjang. "Itulah arti mendasarkan politik kepada kehendak rakyat."

Hanya dengan mengambil inisiatif kembali yang telah dilepaskan oleh pemerintah selama ini, diharapkan, bahwa pemerintah terlepas dari posisi defensifnya seperti sekarang. Dengan begitulah mungkin timbul satu iklim pikiran yang lebih segar, yang akan dapat melahirkan elan nasional baru. Bebas dari bekas persengketaan-persengketaan yang lama. Elan dan gembira membanting tenaga yang diperlukan dan yang selekas mungkin dapat disalurkan untuk pembangunan negara kita ini. Semuanya itu diliputi oleh suasana nasional dengan arti yang tinggi serta terlepas dari soal atau paham unitarisme, federalisme, provinsialisme dan lain-lain.

Itulah inti pokok pikiran Natsir yang disampaikan dalam suatu pidato yang penting dan bersejarah dalam parlemen RIS pada tanggal 3 April 1950 tentang pembentukan Negara Kesatuan. Dan kemudian bagaimana?

Pidato yang banyak mendapat perhatian dan pemikiran dari para wakil rakyat dari seluruh penjuru tanah air itu dikuncinya dengan suatu mosi kepada pemerintah yang berbunyi :

" Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RIS dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan programatis

terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-akhir ini."

Memperhatikan :

" Suara-suara rakyat dari berbagai daerah dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya kedalam Pemerintah Rebuplik Indonesia.

Kompak untuk menampung segala akibat-akibat yang tumbuh karenanya, dan persiapan-persiapan untuk itu harus diatur begitu rupa, dan menjadi program politik dari pemerintah yang bersangkutan dan dari pemerintah Rebuplik Indonesia Serikat.

Politik peleburan dan penggabungan itu membawapengaruh besar tentang jalannya politik umum di dalam negeri dari pemerintah di seluruh Indonesia.

Memutuskan :

Menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi soal –soal yang hangat yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral dan program yang tertentu.

Sumber :

Yusuf Abdullah Puar, 1978, *Mohammad Natsir 70 tahun : Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta : Pustaka Antara

Lampiran 5



SILABUS

Mata Pelajaran : Sejarah

Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Atas

Kelas/Semester : II/3

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik 1945-1958 sebagai usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasil Belajar	Memahami Peranan Mohammad Nastir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958.
Indikator	1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terjun dalam bidang politik ? 2. Menjelaskan peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958 ? 3. Menjelaskan hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia ? 4. Menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan dalam peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik,

	seperti nilai nasionalisme, nilai agama ?
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu menjelaskan : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terjun dalam bidang politik. 2. Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958. 3. Hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia.
Langka Pembelajaran	I. Pendahuluan * Apersepsi * Penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. II. Kegiatan Inti Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik. a. Faktor Keluarga b. Faktor Pendidikan c. Watak dan kepribadian 2. Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik

	di Indonesia 1945-1958. a. Peranan Mohammad Natsir sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat 1945-1946. b. Peranan Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan 1946-1949 c. Peranan Mohammad Natsir sebagai ketua partai Masyumi 1949-1958. d. Peranan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri 1950-1951. 3. Hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia. a. Kementerian Penerangan Republik Indonesia. b. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). c. Meningkatnya Perekonomian ketika menjadi Perdana Menteri. 4. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik seperti nilai-nilai nasionalisme dan nilai agama.
--	---

	III. Penutup. - Guru menyimpulkan isi keseluruhan materi pelajaran - Guru mengevaluasi siswa secara tertulis.
Sarana dan sumber Pembelajaran	- Sarana Pembelajaran - Gambar Mohammad Natsir - Sumber Pembelajaran. - Ajib Rosidi, 1990, Mohammad Natsir Sebuah Biografi, Jakarta : Giri Mukti Pasaka. - Dr. Thohir Luth, 2001, Mohammad Natsir Dakwah dan Pemikirannya, Jakarta : Gema Insani Press. - Yusuf Abdullah Puar, 1978, Mohammad Natsir 70 tahun : Kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan, Jakarta, Pustaka antara. - Mohammad Natsir, 1973, Capita Selekta, Jakarta, Bulan Bintang.
Penilaian	- Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami Peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958. - Memberikan tugas kepada siswa.

	3. Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar dan diskusi di kelas. 4. Portofolio. * Guru mencatat aktivitas siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. * Guru mengumpulkan seluruh kegiatan siswa baik catatan, tugas individu maupun kelompok.
Alat Evaluasi	1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Mohammad Natsir terlibat dalam bidang politik ? 2. Jelaskan peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958 ? 3. Jelaskan hasil perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia ? 4. Jelaskan nilai-nilai yang ditanamkan dalam peranan Mohammad Natsir dalam bidang politik di Indonesia 1945-1958 ?

Yogyakarta, 17 September 2005

Guru Bidang Studi



(Murtini)